

KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT UMUM (selanjutnya disebut “Ketentuan dan Syarat”)

Pasal 1 DEFINISI

Definisi-definisi teknis yang digunakan dalam ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum ini, kecuali konteksnya secara tegas mengartikan lain, mempunyai arti sebagaimana dijelaskan di bawah ini;

- 1.1. “**Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**” atau disingkat “**AD/ART**” adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni, baik yang ditetapkan oleh **Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun Sementara (P3SRSS)**, ataupun **Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun (P3SRS)**, termasuk setiap perubahan dan penambahannya dikemudian hari.
- 1.2. “**Area Parkir**” adalah setiap tempat parkir di dalam Komplek baik yang terletak di ruang terbuka maupun di dalam gedung parkir, baik secara keseluruhan maupun yang terbagi menjadi beberapa **Lot Parkir** yang diserahkan kepemilikannya kepada, dikuasai, dan dikelola serta dioperasikan oleh **Perusahaan Perparkiran**.
- 1.3. “**Booking Fee** atau disingkat **BF**” adalah sejumlah uang yang disetor oleh **PEMESAN** kepada rekening Bank atas nama **PENERIMA PESANAN** sebagai syarat untuk bisa memiliki **Unit** yang akan dipesan dan besarnya ditentukan sepenuhnya oleh **PENERIMA PESANAN**.
- 1.4. “**Blok**” adalah pembangunan real estate / properti yang letaknya di dalam **Klaster** pada **Komplek** maupun **Sub Komplek**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada: sarusun hunian (apartemen) maupun campuran (office, mall, rumah sakit, sekolah, hotel, convention hall, club, theater, dan jenis non hunian lainnya yang diperuntukan selain untuk hunian atau yang sering disebut sebagai non hunian). **Blok** tersebut bisa berdiri di atas **Tanah Bersama** sendiri (*stand alone*) ataupun berdiri di atas **Tanah Bersama** campuran (*mixed use*), sebagaimana tercantum dalam **Sertipikat Tanah Bersama** yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau gambar yang dibuat oleh **PENGEMBANG**.
- 1.5. “**Bagian Bersama**” adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan Rumah Susun, antara lain fondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, lift, selasar, saluran, pipa yang secara tegas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari rumah susun. Jaringan listrik, gas, dan telekomunikasi yang tidak menjadi satu kesatuan dengan Unit, bukan merupakan Bagian Bersama.
- 1.6. “**Badan Pengelola** atau disingkat **BP**” adalah PT Mega Prima Kreasi, yang bertugas melaksanakan termasuk namun tidak terbatas kepada pengelolaan, pemeliharaan dan pengoperasian baik di dalam **Komplek, Sub Komplek, Klaster, Blok, Tower** maupun **Unit**.
- 1.7. “**Bank**” adalah lembaga pembiayaan perbankan yang ditunjuk dan yang bekerjasama dengan **PENERIMA PESANAN**.
- 1.8. “**Benda Bersama**” adalah benda yang bukan merupakan bagian dari Rumah Susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama, antara lain ruang pertemuan, tanaman, bangunan pertamanan, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, dan tempat parkir yang terpisah atau menyatu dengan struktur bangunan rumah susun kecuali secara khusus dinyatakan dalam **Ketentuan dan Syarat** ini.
- 1.9. “**Berita Acara Serah Terima** atau disingkat **BAST**” adalah berita acara mengenai penyerahan dan penerimaan **Unit** yang ditandatangani oleh **PENERIMA PESANAN** dengan **PEMESAN** pada **Tanggal Serah Terima**.
- 1.10. “**Biaya Penggunaan**” adalah biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan **PEMESAN** atau **Pemilik, Penyewa** atau **Penghuni** pada **Unit** milik **PEMESAN** sehubungan dengan penggunaan **Unit** dan fasilitas-fasilitasnya, sesuai dengan pemakaian, namun demikian tidak terbatas pada pemakaian telepon, listrik, air, gas, TV, internet, asuransi barang-barang yang ada di dalam **Unit** dan lain-lainnya, yang wajib dibayar langsung kepada pihak ketiga. **Biaya Penggunaan** tidak termasuk dalam tagihan **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan** serta biaya untuk memelihara dan mengamankan **Tanah**

Bersama, Bagian Bersama dan Benda Bersama di dalam Blok.

- 1.11. "Divisi rental dan secondary sales atau DRSS" adalah pihak yang ditunjuk oleh PENERIMA PESANAN/PENGEMBANG untuk melakukan pemasaran, penyewaan dan/atau penjualan terhadap Properti kepada pihak lain.
- 1.12. "Force Majeure" memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22.1 **Ketentuan dan Syarat**.
- 1.13. "Fasilitas Bersama Komplek" adalah fasilitas-fasilitas yang tersedia pada Komplek termasuk namun tidak terbatas pada antara lain ; Central Park, International Olympic Sport Center, Life Science Park, Health Research Center, Medical Institutions, dan fasilitas lainnya yang mungkin akan ada di dalam Komplek.
- 1.14. "Hak Tagihan Pesanan" memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4.9 **Ketentuan dan Syarat** ini.
- 1.15. "Harga" adalah harga yang harus dibayarkan oleh PEMESAN kepada PENERIMA PESANAN untuk pemesanan atas Unit yang besarnya dan cara pembayarannya sebagaimana ditentukan dalam **Konfirmasi Pesanan**.
- 1.16. "Harga Net" adalah harga setelah dikurangi semua potongan harga (*discount*), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 1.17. "Iuran Pengelolaan" (atau disebut juga sebagai "Service Charge") adalah biaya pengelolaan dan pemeliharaan untuk mengoperasikan atas **Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama**, meliputi namun tidak terbatas kepada biaya manajemen pengelola, pajak-pajak yang terkait dengan pengelolaan, pemakaian seluruh utilitas termasuk namun tidak terbatas kepada listrik, air, asuransi (bukan asuransi untuk barang milik pribadi), kebersihan dan perbaikan ringan dan kecil, keamanan lingkungan (*security*), dan seluruh biaya administrasi berkaitan dengan pengelolaan, baik pada Klaster-Klaster, Blok-Blok, Tower-Tower, Unit-Unit maupun kontribusi **Iuran Pengelolaan** pada **Komplek, Sub Komplek dan Fasilitas Bersama Komplek**, yang pembayarannya wajib dibayar oleh PEMESAN.
- 1.18. "Iuran Dana Cadangan (atau disebut juga sebagai "Sinking Fund")" adalah dana cadangan yang akan dipergunakan untuk melakukan perbaikan, pengadaan/penambahan yang sifatnya besar, tidak rutin dan tahan lama, yang meliputi namun tidak terbatas kepada pengecatan bagian luar gedung, *overhaul*, penggantian baru *lift*, penambahan *lift*, pengadaan *canopy* dan lain-lainnya, yang ada pada Klaster-Klaster, Blok-Blok, Tower-Tower, Unit-Unit maupun kontribusi **Iuran Pengelolaan** pada **Komplek, Sub Komplek dan Fasilitas Bersama Komplek**, yang pembayarannya wajib dibayar oleh PEMESAN dan tidak dapat dikembalikan apabila Unit dialihkan kepada pihak lain.
- 1.19. "Key Plan dan Floor Plan" adalah denah lokasi Unit sebagaimana ditentukan dalam lampiran dari dan yang menjadi satu kesatuan dengan **Penegasan Pemesanan**.
- 1.20. "Klaster" adalah bangunan-bangunan gedung bertingkat yang terdiri dari beberapa bagian **Blok dan Tower**, baik berupa jenis hunian maupun non hunian, yang merupakan bagian dari **Komplek** atau **Sub Komplek**.
- 1.21. "Komplek" adalah suatu kawasan yang di atasnya berdiri bangunan-bangunan gedung bertingkat, bisa terdiri dari satu atau lebih **Klaster, Blok dan Tower**, yang dimiliki, didesain, dikembangkan dan dikelola secara penuh oleh PENGEMBANG, yang meliputi pembangunan namun tidak terbatas antara lain: Apartemen, *shopping mall*, hotel, perkantoran, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas bersama antarlain : Central Park, International Olympic Sports Center, Health Research Center, Medical Institutions, serta seluruh fasilitas termasuk tapi tidak terbatas kepada jalanan, tanaman, dan lain-lain yang akan dilakukan pembangunannya secara bertahap, dalam waktu dan cara yang tidak bersamaan serta tidak berurutan pembangunannya (tidak ada urutan mana yang akan dibangun terlebih dahulu).
- 1.22. "Konfirmasi Pesanan" adalah konfirmasi atas pemesanan Unit oleh PEMESAN yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Penegasan Pemesanan**.
- 1.23. "Lembaga Pembiayaan" adalah suatu lembaga perbankan atau perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit/pembiayaan kepada PEMESAN untuk pemesanan Unit. Dalam hal tidak ada

Bank atau Lembaga Pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan, maka **PENERIMA PESANAN** berhak (dan bukan merupakan kewajiban) untuk menawarkan alternatif pembayaran seperti antara lain: memfasilitasi penyediaan pembiayaan yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** atau menawarkan alternatif pembayaran secara bertahap dengan opsi **PENERIMA PESANAN** berhak untuk mengalihkan hak atas tagihan (hak atas angsuran) kepada pihak lain setiap saat tanpa diperlukan persetujuan dari **PEMESAN**. **PENERIMA PESANAN** juga dapat (dan bukan merupakan kewajiban) memfasilitasi pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** bagi **PEMESAN** yang memilih pembayaran angsuran melalui tunai bertahap dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4.8.2 **Ketentuan dan Syarat**.

- 1.24. "**Luas Bruto** disebut juga **Luas Gross**" adalah dihitung luas lantai sampai pada batas dinding terluar termasuk Bagian Bersama dan Benda Bersama yang dihitung secara proporsional, tidak termasuk Area Parkir. Apabila tidak ditentukan secara khusus dalam **Ketentuan dan Syarat** ini, yang dimaksud dengan luas unit adalah Luas Gross.
- 1.25. "**Luas Nett**" adalah luas area karpet.
- 1.26. "**Luas Semi Gross**" adalah luas unit antara Luas Bruto dan Luas Nett, yang dapat dihitung dengan perhitungan Luas Bruto dikurangi dengan luas proporsional dari koridor bersama, tidak termasuk lift, tangga darurat dan shaft.
- 1.27. "**Luas Strata**" adalah luasan berdasarkan perhitungan dari pihak yang berwenang yang dipakai oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dicantumkan dalam **Sertipikat**.
- 1.28. "**Lot Parkir**" adalah satu bagian dari Area Parkir yang hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau kendaraan roda dua milik **PEMESAN**.
- 1.29. "**Masa Jaminan**" adalah suatu jangka waktu dimana **PENERIMA PESANAN** masih bertanggung jawab atas perbaikan cacat-cacat yang terjadi pada **Unit** seperti yang tertulis pada **BAST** yang akan berakhir secara otomatis apabila jangka waktu yang disebutkan telah lewat dan/atau **PEMESAN** melakukan perubahan/renovasi setelah **BAST** dilakukan.
- 1.30. "**Nilai Perbandingan Proporsional**" (selanjutnya disebut "**NPP**") berarti angka yang menunjukkan perbandingan antara **Sarusun** terhadap hak atas **Bagian Bersama**, **Benda Bersama** dan **Tanah Bersama** yang dihitung berdasarkan nilai **Sarusun** yang bersangkutan terhadap jumlah nilai **Sarusun** secara keseluruhan yang dihitung dan ditentukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- 1.31. "**Nilai Sisa Pekerjaan**" adalah nilai atas bagian pekerjaan konstruksi yang belum diselesaikan pembangunannya oleh **PENERIMA PESANAN**, atas **Unit** yang dipesan **PEMESAN** yang diperhitungannya dilakukan oleh lembaga atau pihak independen yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN**.
- 1.32. "**Para Pihak**" adalah **PEMESAN**, **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG**.
- 1.33. "**PENERIMA PESANAN**" adalah perseroan terbatas yang disebutkan pada komparisi **Penegasan Pemesanan**, sebagai suatu badan usaha milik swasta yang memiliki tanah, mengembangkan, membangun dan menerima pemesanan **Unit** dan memiliki kewenangan untuk mengelola operasional setelah serah terima. **PENERIMA PESANAN** adalah juga **PENGEMBANG**, kecuali dinyatakan secara tegas sebagai 2 (dua) pihak yang berbeda.
- 1.34. "**Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit** atau disingkat **PPPU**, yang disebut juga **Penegasan Pemesanan** " termasuk **Ketentuan dan Syarat** ini adalah kesepakatan yang mengikat **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN**, yang berisi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari kesepakatan seperti tercantum pada lampiran **Penegasan Pemesanan** dan pasal-pasal dalam **Ketentuan dan Syarat** di bawah ini, antara lain **Unit** yang dipesan, spesifikasi, **Harga** dan cara pembayaran berikut aturan-aturan yang wajib ditaati termasuk ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan setelah transaksi jual beli.
- 1.35. "**PENGEMBANG**" adalah pihak yang melakukan perencanaan dan koordinator pelaksana pembangunan maupun pengelolaan setelah pembangunan/pengelolaan operasional dari **Klaster**, **Blok**,

Tower, Unit, Sub Komplek maupun **Komplek** secara keseluruhan.

- 1.36. **“Penghuni”** adalah perorangan atau badan hukum yang memakai atau memanfaatkan atau bertempat tinggal dalam **Unit**.
- 1.37. **“PEMESAN”**(disebut juga **“Pemilik”** atau **“Pembeli”**) adalah perorangan atau badan hukum yang memesan dan yang akan memiliki (termasuk yang menerima pengalihan hak) atas **Unit**. **Pemilik** dapat juga menjadi **Penghuni**, tetapi **Penghuni** belum tentu adalah **Pemilik**.
- 1.38. **“Pertelaan”** adalah denah dan/atau potongan yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari **Unit** dan/atau tata letak dari **Bagian Bersama** per **Blok**, kesemuanya dinyatakan dalam bentuk gambar dan uraian yang dibuat oleh **PENGEMBANG** yang disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, dengan tujuan untuk menjelaskan hak kepemilikan atas area yang telah dipertelakan tersebut.
- 1.39. **“Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun Sementara“** yang juga disebut **”P3SRSS”** adalah perhimpunan yang mewakili seluruh Pemilik **Unit**. **PENGEMBANG** bertindak sebagai **P3SRSS** sampai dengan terbentuknya **Perhimpunan Penghuni**. **P3SRSS** ini bisa terdiri dari dan membawahi lebih dari 1 (satu) sub **P3SRSS** dari masing-masing **Blok** dalam satu **Klaster**.
- 1.40. **“Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun”** (selanjutnya disebut **”P3SRS”**) adalah perhimpunan yang mewakili seluruh **Pemilik Sarusun** yang dibentuk oleh **Pemilik** atau pihak lain yang mendapat kuasa/kewenangan dari **Pemilik Sarusun** melalui suatu Rapat Umum **P3SRS**, yang memenuhi syarat sebagai pemegang **Sertipikat** atas **Unit** berdasarkan (i) Peraturan Perundang-undangan mengenai Rumah Susun, (ii) peraturan yang telah ditentukan oleh **PENERIMA PESANAN**. **P3SRS** ini bisa terdiri dari dan membawahi lebih dari 1 (satu) sub **P3SRS** dari masing-masing **Blok** dalam satu **Klaster**.
- 1.41. **“Peraturan Rumah Susun”** adalah semua peraturan perundang-undangan tentang rumah susun yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sebagaimana dirinci dibawah ini dan peraturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah dikemudian hari, termasuk setiap perubahan, penyempurnaan dan penggantian, serta peraturan pelaksanaannya :
 - i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (**“Undang-Undang Rumah Susun”**);
 - ii Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
 - iii Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;
 - iv Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertipikat.
- 1.42. **“Peraturan Tata Tertib Komplek”** adalah peraturan tata tertib yang diberlakukan oleh **PENGEMBANG** dan/atau pihak yang ditunjuk oleh **PENGEMBANG** sebagai pihak yang melakukan pengelolaan atas **Komplek**, sehingga dapat menciptakan **Komplek** yang tertata rapi, nyaman dan aman. **Peraturan Tata Tertib Komplek** merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Peraturan Tata Tertib Sarusun, **Penegasan Pemesanan**, maupun **Ketentuan dan Syarat** dan Akta Jual Beli (AJB).
- 1.43. **“Peraturan Tata Tertib Sarusun** selanjutnya disebut **Tatib Sarusun”** adalah peraturan tata tertib yang diberlakukan oleh **PENGEMBANG** dan/atau pihak yang ditunjuk oleh **PENGEMBANG**. **Peraturan Tata Tertib Sarusun** merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat **Penegasan Pemesanan** maupun **Ketentuan dan Syarat** dan AJB dan juga bagian dari **Peraturan Tata Tertib Komplek**, yang diserahkan bersamaan dengan penandatanganan **Penegasan Pemesanan**.
- 1.44. **“Perusahaan Perpajakan”** adalah suatu badan hukum yang dibentuk dan/atau ditunjuk oleh **PENGEMBANG** dan/atau **PENERIMA PESANAN**, yang menerima penyerahan kepemilikan Area Parkir, menguasai Area Parkir, mengelola serta mengoperasikan Area Parkir.
- 1.45. **“PPAT”** adalah seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di wilayah dimana **Klaster/Blok/Tower** berada dan berwenang untuk membuat akta jual beli sehubungan dengan **Unit**

Sarusun, yang ditunjuk oleh **PENGEMBANG**.

- 1.46. “**Properti**” adalah benda tidak bergerak yang bisa terdiri dari tanah saja atau tanah dan bangunan, baik berupa bangunan yang berdiri terpisah (*stand alone*) atau berderet (*town house*), juga bagian dari bangunan vertikal (disebut juga **Tower**), yang peruntukannya sebagai tempat tinggal, yang dimiliki dan dipakai hanya oleh **PEMESAN** atau yang ditunjuk oleh **PEMESAN**.
- 1.47. “**Satuan Rumah Susun** juga disingkat **Sarusun**” adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu **Tower** yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal, yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang dilengkapi dengan **Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama**, sesuai dengan gambar dan peruntukan yang dibuat oleh **PENGEMBANG**.
- 1.48. “**Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun** atau disebut juga **Sertipikat**” adalah sertipikat tanda bukti kepemilikan **Unit Sarusun** yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 1.49. “**Spesifikasi Unit**” adalah spesifikasi dasar setiap **Unit** sebagaimana ditentukan dalam lampiran dari dan yang menjadi satu kesatuan dengan **Penegasan Pemesanan**.
- 1.50. “**Sub Komplek**” adalah merupakan salah satu tahapan fase pengembangan dari sebuah **Komplek**, yang dibangun sekaligus dalam beberapa fase/tahapan oleh **PENGEMBANG**, yang terdiri dari satu atau beberapa **Klaster, Blok dan Tower**.
- 1.51. “**Tanah Bersama**” adalah sebidang tanah tertentu di atas mana **Sarusun** didirikan, yang digunakan oleh **Pemilik/Penghuni** atas dasar hak bersama secara tidak terpisahkan. Ketentuan **Tanah Bersama** ini mengacu kepada ketentuan gambar perencanaan awal termasuk perubahannya (bilamana ada) yang ditentukan oleh **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG** dan sepanjang **Tanah Bersama** ini telah disetujui dan disahkan oleh instansi yang berwenang.
- 1.52. “**Tanggal Serah Terima**” adalah suatu tanggal penyerahan **Unit** yang ditentukan dalam **Konfirmasi Pesanan** termasuk masa tenggang waktu perpanjangannya.
- 1.53. “**Tanggal BAST**” adalah tanggal penandatanganan **BAST** oleh **PEMESAN**, atau oleh **PENERIMA PESANAN** berdasarkan kuasa dari **PEMESAN**.
- 1.54. “**Tower**” adalah bangunan gedung-gedung bertingkat yang dibangun dan berdiri dalam suatu Blok pada **Komplek** atau **Sub Komplek**, sesuai dengan gambar dan peruntukan yang ditentukan oleh **PENGEMBANG**, masing-masing dapat memiliki fasilitas secara sendiri-sendiri terpisah atau dipakai secara bersama-sama dalam suatu **Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama**.
- 1.55. “**Uang Muka** disebut juga **Down Payment, disingkat DP**” adalah sejumlah uang yang disetor oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** sebagai pembayaran dimuka atas pemesanan **Unit** yang telah dipilih, sebelum **PEMESAN** melunasi sisa **Harga**.
- 1.56. “**Unit**” adalah **Properti** yang dipesan oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN**, yang secara spesifik disebutkan pada **Konfirmasi Pesanan** serta **Key Plan dan Floor Plan** yang merupakan satu kesatuan dari **Penegasan Pemesanan** ini.

Pasal 2 **UNIT YANG DIPESAN**

- 2.1. **PENERIMA PESANAN** dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi pesanan dari **PEMESAN**, dan **PEMESAN** dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memesan kepada **PENERIMA PESANAN**, **Unit** yang disebutkan dalam **Konfirmasi Pesanan**, sesuai dengan **Harga** dan cara pembayaran yang telah ditentukan dalam **Konfirmasi Pesanan**, serta sesuai dengan Spesifikasi Unit, **Key Plan dan Floor Plan**, serta ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum pada pasal-pasal dibawah ini.
- 2.2. **Para Pihak** memahami dan mengakui bisa terjadi perbedaan referensi pengukuran antara brosur,

dokumen **Penegasan Pemesanan** dengan **Sertipikat**, dimana brosur, dokumen **Penegasan Pemesanan** menggunakan perhitungan **Luas Gross**, sementara **Sertipikat** menggunakan perhitungan **Luas Nett** yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang menggunakan metode perhitungan yang berbeda. Oleh karenanya, **PEMESAN** menerima apa adanya (*as is*) luasan **Unit** tersebut dan tidak akan melakukan tuntutan/gugatan kepada **PENERIMA PESANAN** dalam bentuk apapun juga dikarenakan adanya perbedaan luas karena metode perhitungan yang berbeda tersebut, termasuk apabila terjadi perbedaan dalam penamaan dan penomoran Unit yang digunakan oleh **PENERIMA PESANAN** berbeda dengan **Sertipikat** yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- 2.3. **PEMESAN** dengan ini menyadari, memahami dan mengakui bahwa seluruh dokumen awal pemasaran, termasuk namun tidak terbatas pada: brosur, flyer dan dokumen media pemasaran lainnya, merupakan gambar perencanaan awal dari **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG**, dengan demikian **PEMESAN** menyadari, memahami dan mengakui bahwa perencanaan awal tersebut dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PEMESAN**. Namun demikian **PENGEMBANG** dalam melakukan pembangunan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mengacu kepada gambar perencanaan awal dan menggunakan standar yang berlaku yang tidak terlalu membebani Iuran Pengelolaan yang wajib dibayar oleh **PEMESAN**. Khusus terhadap **Unit PEMESAN**, perubahan hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan dari **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG**.
- 2.4. Penyediaan fasilitas-fasilitas termasuk dan tidak terbatas pada sarana transportasi, dan **Fasilitas Bersama Komplek** sebagaimana dinyatakan dalam media pemasaran tersebut diatas ditentukan sepenuhnya oleh **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG**, serta tergantung pada persetujuan dari otoritas instansi yang berwenang.
- 2.5. **PEMESAN** menyadari dan memahami bahwa di dalam suatu **Komplek** yang padat dengan bangunan gedung-gedung bertingkat memungkinkan timbulnya polusi udara maupun polusi suara, termasuk namun tidak terbatas pada; kebisingan dan keramaian yang berasal dari transportasi umum (antara lain kereta cepat, bus, automate people mover (APM) maupun transportasi umum lainnya), termasuk pembangunan gedung-gedung bertingkat yang dilakukan secara terus-menerus yang dapat mengganggu kenyamanan **PEMESAN** untuk melakukan aktivitas di dalam **Komplek** dan karenanya **PEMESAN** membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari segala tuntutan, gugatan dan klaim sehubungan dengan hal tersebut diatas.
- 2.6. Para Pihak menyadari dan memahami resiko dengan melakukan pemesanan sebelum konstruksi dimulai, dapat mengakibatkan terjadinya perubahan atau ditiadakannya **Unit** yang dipesan, termasuk namun tidak terbatas pada: letak, layout, luas dan posisi utilitas **Bagian Bersama**, maupun perubahan rancangan atau rencana pembangunan keseluruhan yang berbeda dengan perencanaan awal. Apabila hal ini terjadi, maka **PEMESAN** mempunyai opsi untuk:
 - 2.6.a. memilih dari **Unit** lainnya yang ditawarkan sebagai **Unit** pengganti, atau
 - 2.6.b. tetap pada **Unit** tersebut, dengan perubahan letak, layout, luas dan posisi utilitas **Bagian Bersama**.Akibat dari opsi manapun yang dipilih, maka para pihak sepakat untuk membuat perhitungan yaitu perbedaan luas dihitung dengan harga per meter persegi yang disepakati dalam **Konfirmasi Pesanan** pada saat pemesanan, dan tidak diperbolehkan melakukan perubahan terhadap cara pembayaran, kecuali terhadap nilai **Harga** saja.
- 2.7. Lokasi Tower dan/atau Unit yang dipesan oleh **PEMESAN** akan ditentukan dan ditempatkan sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau **PENGEMBANG**.

Pasal 3 PERUNTUKAN

- 3.1 **PEMESAN** melakukan pemesanan **Unit** dengan sadar dan hanya akan dipergunakan seperti yang telah ditentukan dalam **Konfirmasi Pesanan** serta mengetahui bahwa peruntukan tidak dapat diubah karena alasan apapun untuk selamanya.
- 3.2 Apabila **PEMESAN** atau pihak yang menerima pengalihan kepemilikan/pemakaian mempergunakan **Unit** untuk tujuan lain dan melanggar ketentuan tentang penggunaan pada Pasal 3.1 diatas, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab **PEMESAN** sepenuhnya dan membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak manapun juga, termasuk sanksi hukum dari pihak yang berwenang, bahkan dapat berakibat dibatalkannya **Penegasan Pemesanan**, mengacu pada ketentuan

pembatalan/pemutusan Pasal 10 dibawah ini.

Pasal 4 **HARGA DAN CARA PEMBAYARAN**

- 4.1 Pemesanan **Unit** disepakati dengan **Harga**, tata cara dan tahapan pembayaran sebagaimana dirinci dalam **Konfirmasi Pesanan**. Di dalam **Harga** tersebut belum termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya seperti namun tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah/PPn BM (bilamana ada), biaya pembuatan Akta Jual Beli **PPAT**, biaya untuk proses pemecahan / pertelaan dan pengurusan balik nama **Sertipikat** ke atas nama **PEMESAN**, yang terdiri dari biaya resmi yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta jasa pengurusan oleh Notaris/**PPAT**, pajak-pajak serta pungutan lain-lain yang akan ada serta ditagih dikemudian hari baik oleh **PENERIMA PESANAN** dan/atau instansi yang berwenang serta perubahan/penyesuaian atas nilai pajak yang telah berlaku pada saat ini, **Iuran Pengelolaan Blok, Klaster** maupun **Komplek, Biaya Penggunaan** dan **Iuran Dana Cadangan Blok, Klaster** maupun **Komplek**, kecuali ditentukan lain pada **Konfirmasi Pesanan**.
- 4.2. Apabila setelah penandatanganan **Penegasan Pemesanan**, Pemerintah mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah/kebijakan yang baru dan berlaku surut atau mempunyai penafsiran yang berbeda dengan yang digunakan di dalam **Penegasan Pemesanan**, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pajak-pajak maupun pungutan-pungutan yang merupakan beban serta wajib ditanggung sepenuhnya oleh **PEMESAN**, maka **PEMESAN** setuju dan bersedia untuk menanggung tambahan biaya-biaya, pajak maupun pungutan tersebut dan melakukan pembayaran sekaligus atas tambahan tersebut dan segera setelah ditagih oleh **PENERIMA PESANAN**.
- 4.3. Semua pembayaran **Harga** dan pembayaran-pembayaran lainnya sepakat dilakukan dengan mata uang Rupiah dan harus dilakukan secara penuh dan tanpa potongan apapun. Setiap dan seluruh biaya administrasi sehubungan dengan pembayaran menjadi beban dan tanggung jawab **PEMESAN**.
- 4.4. Apabila **Harga** pada **Konfirmasi Pesanan** menggunakan mata uang asing, maka setiap konversi pembayaran ke rekening Rupiah **PENERIMA PESANAN**, menggunakan kurs jual Bank Indonesia (BI) pada saat tanggal pembayaran. Dalam hal BI tidak menetapkan kurs jual, maka kurs yang dipergunakan adalah kurs jual rata-rata pada 2 (dua) Bank.
- 4.5. Untuk setiap pembayaran **Harga** dimaksud tidak diperlukan lagi suatu tagihan dan peringatan oleh **PENERIMA PESANAN** kepada **PEMESAN** dan karenanya **PEMESAN** mengikatkan diri untuk melakukan setiap pembayaran tersebut di dalam jumlah dan pada waktu yang tepat sesuai dengan jadwal pembayaran yang tercantum pada **Konfirmasi Pesanan**.
- 4.6. Untuk memudahkan dan memperlancar pembayaran selanjutnya, setiap pembayaran yang belum jatuh tempo, **PEMESAN** wajib melakukan salah satu pilihan cara bayar :
 - 4.6.1. membuat perintah auto debet pada Bank, dengan tetap memperhatikan ketersediaan dananya pada saat tanggal dilakukan perintah pendebitan,
 - 4.6.2. surat perintah (*standing instruction*) transfer ke rekening **PENERIMA PESANAN**, atau
 - 4.6.3. memberikan Giro yang harus diisi lengkap dengan data-data antara lain, tanggal harus disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, nomor rekening harus diisi sebagaimana dicantumkan pada **Konfirmasi Pesanan**. Di belakang giro bilyet dilengkapi dengan data-data antara lain nama **PEMESAN** dan nomor **Konfirmasi Pesanan**.
- 4.7. Setiap pembayaran dari **PEMESAN** yang diterima oleh **PENERIMA PESANAN** akan diberikan kuitansi yang dikirimkan secara elektronik ke alamat surat elektronik (*e-mail*) **PEMESAN** sebagaimana tercantum di **Penegasan Pemesanan**, kuitansi asli hanya dikirim atas permintaan khusus **PEMESAN** dengan biaya pengiriman dan bea materai sesuai ketentuan yang berlaku akan dibebankan kepada **PEMESAN**, yang dibuktikan dengan tanda terima pengiriman.
- 4.8. Pembayaran **Harga** dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
 - 4.8.1. Tunai
Harga dikurangi **BF** dan **DP**, sisanya wajib dibayar sekaligus lunas, tidak dapat diangsur, mengikuti tata cara sebagaimana Pasal 4 ayat 12 dibawah ini.

4.8.2. Angsuran

Harga dikurangi **BF** dan **DP** dan sisanya diangsur secara bulanan:

- a. pada tanggal dan jumlah yang disepakati dalam **Konfirmasi Pesanan**;
- b. **PEMESAN** memberikan perintah pada Bank untuk auto debit ke rekening bank **PENERIMA PESANAN**.

Pembayaran melalui metode angsuran dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- (i) angsuran melalui tunai bertahap kepada **PENERIMA PESANAN**, dan
- (ii) angsuran melalui Lembaga Pembiayaan.

Dalam hal metode pembayaran yang dipilih **PEMESAN** adalah angsuran melalui tunai bertahap kepada **PENERIMA PESANAN**:

- a. **PEMESAN** yang memilih metode pembayaran tunai bertahap dapat melakukan pelunasan yang dipercepat atas sisa **Harga** dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PENERIMA PESANAN**.
- b. **PEMESAN** berkewajiban untuk menandatangani Pinjam Pakai pada saat penyerahan fisik **Unit** sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yang berarti sebelum **Harga** lunas, **PEMESAN** meminjam pakai atas **Unit** dan **PENERIMA PESANAN** tetap menjadi pemilik atas **Unit** tersebut sampai dengan pelunasan **Harga** yang pada saat sudah dilakukan pelunasan pembayaran dianggap telah diserahkan kepada **PEMESAN**.
- c. **PENERIMA PESANAN** dapat (dan bukan merupakan kewajiban) sewaktu-waktu memfasilitasi penyediaan pembiayaan yang disediakan oleh **Lembaga Pembiayaan** yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN**, bagi **PEMESAN** yang memilih pembayaran angsuran melalui tunai bertahap, yang telah memenuhi syarat berdasarkan pertimbangan **PENERIMA PESANAN**. Penunjukan tersebut merupakan kewenangan absolut **PENERIMA PESANAN** yang tidak dapat diganggu gugat.

*Dalam hal **PEMESAN** merupakan pihak yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** sebagai pihak yang berkesempatan untuk mengikuti proses pembiayaan yang disediakan oleh **Lembaga Pembiayaan** tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan butir (c-g) di bawah ini, **PEMESAN BERKEWAJIBAN DAN TUNDUK** (tanpa syarat dan tanpa ditarik kembali) untuk mengikuti segala proses yang dipersyaratkan oleh **Lembaga Pembiayaan** tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani segala perjanjian, dokumen, akta, surat-surat dan segala bentuk dokumentasi lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pembiayaan tersebut.*

Untuk menghindari keraguan, pemberian fasilitas penyediaan pembiayaan tersebut tidak ditawarkan kepada semua dan setiap **PEMESAN** yang memilih angsuran melalui tunai bertahap. **PEMESAN** yang tidak ditawarkan fasilitas pembiayaan tersebut dengan ini menyatakan dengan tegas dan tanpa ditarik kembali untuk membebaskan dan melepaskan segala hak untuk mengajukan gugatan, keberatan, tuntutan, laporan, keluhan (baik secara pidana dan/atau perdata dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun) terhadap **PENERIMA PESANAN** serta membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari dan terhadap setiap semua kerugian yang terjadi akibat tidak ditawarkan fasilitas pembiayaan kepada **PEMESAN** yang bersangkutan.

- d. Dalam hal **PEMESAN** ditunjuk sebagai pihak yang berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan, **PEMESAN** secara mandiri berkewajiban untuk langsung menghubungi **Lembaga Pembiayaan** yang bersangkutan untuk memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan oleh **Lembaga Pembiayaan**. Untuk menghindari keragu-raguan, **PENERIMA PESANAN** tidak dalam kapasitas untuk menyetujui atau menolak atau memberikan jaminan, dukungan (*endorsement*), referensi, rujukan, atas kemampuan dan kapasitas keuangan serta pelaksanaan kewajiban masing-masing **PEMESAN** dan **Lembaga Pembiayaan**. **Lembaga Pembiayaan** berhak melakukan analisa dan kajian secara independen terhadap **PEMESAN** dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan.

- e. Segala pembicaraan, negosiasi, dan segala bentuk komunikasi yang terjadi serta hubungan hukum yang terjadi antara **PEMESAN** dan **Lembaga Pembiayaan** merupakan tanggung jawab pribadi **PEMESAN** dan **Lembaga Pembiayaan** yang bersangkutan. **PEMESAN** dan **Lembaga Pembiayaan** secara sendiri-sendiri dan bersama-sama membebaskan dan melepaskan segala hak untuk mengajukan gugatan, keberatan, tuntutan, laporan, keluhan (baik secara pidana dan/atau perdata dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun) terhadap **PENERIMA PESANAN** serta membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari dan terhadap setiap semua kerugian yang terjadi akibat hubungan yang terjadi antara **PEMESAN** dan **Lembaga Pembiayaan**.
 - f. Sepanjang fasilitas pembiayaan belum disetujui oleh Lembaga Pembiayaan, **PEMESAN** tetap berkewajiban untuk membayar angsuran tunai sesuai dengan **Konfirmasi Pesanan**.
 - g. Dalam hal **PEMESAN** dan **Lembaga Pembiayaan** telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dan **PENERIMA PESANAN** telah menerima pembayaran dari **Lembaga Pembiayaan** (*in good fund*), maka **PENERIMA PESANAN** menyatakan dan berjanji untuk tetap melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam **Penegasan Pemesanan** dan **PEMESAN** menyatakan dan berjanji melaksanakan seluruh kewajiban berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku di dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan **Ketentuan dan Syarat**, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran.
 - h. Dalam hal **PEMESAN** tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh **Lembaga Pembiayaan**, **PEMESAN** tetap berkewajiban untuk memenuhi ketentuan **Penegasan Pemesanan** termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran secara angsuran tunai sesuai dengan **Konfirmasi Pesanan**.
- 4.9. Dalam hal metode pembayaran yang dipilih adalah angsuran melalui tunai bertahap kepada **PENERIMA PESANAN**, **PEMESAN** setuju untuk memberikan hak kepada **PENERIMA PESANAN**:
- 4.9.1. mengalihkan hak atas tagihan (hak atas angsuran yang masih terhutang oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** berdasarkan **Penegasan Pemesanan**, selanjutnya disebut sebagai “**Hak Tagihan Pesanan**”) kepada pihak lain setiap saat. Dengan keuntungan dan kerugian menjadi tanggungan **PENERIMA PESANAN**.
 - 4.9.2. mengalihkan (memberikan hak substitusi) untuk penerimaan angsuran.
 - 4.9.3. pengalihan Hak Tagihan Pesanan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari **PEMESAN**. Setelah **PENERIMA PESANAN** memberikan pemberitahuan pengalihan **Hak Tagihan Pesanan** kepada **PEMESAN**, **PEMESAN** tetap berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban **PEMESAN** berdasarkan **Penegasan Pemesanan** termasuk di antaranya kewajiban pembayaran angsurannya kepada pihak penerima pengalihan yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** sesuai dengan jadwal pembayaran berdasarkan **Konfirmasi Pesanan**.
 - 4.9.4. **PEMESAN** bersedia menandatangani, menyerahkan dokumen dan melakukan pemutakhiran (update) data pribadi yang diperlukan saat dilakukan pengalihan.
 - 4.9.5. **PENERIMA PESANAN** tidak berkewajiban memfasilitasi **PEMESAN** yang memilih angsuran tunai bertahap dengan penyediaan pembiayaan yang disediakan oleh **Lembaga Pembiayaan** yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 4.8.2.
 - 4.9.6. khusus untuk **PEMESAN** yang memilih metode pembayaran dengan angsuran melalui tunai bertahap kepada **PENERIMA PESANAN**, maka **PEMESAN** *wajib* untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada waktu melakukan pemesanan **Unit**, antara lain KTP (suami dan istri), Kartu Keluarga, akta/surat nikah, slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, NPWP pribadi, surat keterangan penghasilan, surat ijin praktek, kartu keanggotaan profesi (untuk pribadi dan profesi), akta-akta perusahaan, ijin-ijin perusahaan, profil perusahaan dan laporan keuangan (khusus untuk Perseroan Terbatas) dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan serta menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh **Lembaga Pembiayaan** yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN**, termasuk dalam hal diperlukan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam hal **PEMESAN** tidak bersedia memenuhi kewajiban dokumen-dokumen yang ditentukan dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh **Lembaga Pembiayaan** yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN**, maka **PEMESAN** wajib menentukan pilihan cara bayar lainnya selain jangka waktu tersebut dalam

ayat ini.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9.5, 9.7 dan Pasal 15.5 **Ketentuan dan Syarat** tetap mengikat dan berlaku bagi **PEMESAN** dan pihak penerima pengalihan yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN**.

- 4.10. **PEMESAN** yang melakukan pembayaran secara angsuran dianggap batal dengan sendirinya, dalam hal:
 - 4.10.1. terdapat salah satu angsuran yang tertunggak seperti pada **Konfirmasi Pesanan**,
 - 4.10.2. jumlah angsuran tidak sesuai dari yang disepakati seperti pada **Konfirmasi Pesanan**,
 - 4.10.3. denda keterlambatan pembayaran belum dilakukan pelunasan.

Untuk ketentuan pembatalan ini berlaku ketentuan Pasal 10 dibawah ini.

- 4.11. Pembayaran **Harga** dengan fasilitas pembiayaan melalui **Lembaga Pembiayaan** :
 - 4.11.1. Apabila sisa pembayaran yang dibayar oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** dilakukan dengan menggunakan fasilitas pembiayaan melalui **Lembaga Pembiayaan**, maka **PEMESAN** wajib segera mengurus fasilitas pembiayaan tersebut sebelum atau segera setelah pemesanan dilakukan, agar tidak terjadi keterlambatan pencairan dan masuk ke rekening **PENERIMA PESANAN** tepat waktu.
 - 4.11.2. **PEMESAN** wajib memastikan pembayaran dari **Lembaga Pembiayaan** kepada **PENERIMA PESANAN** secara tepat waktu dan jumlah seperti pada **Konfirmasi Pesanan**. **PEMESAN** harus menerbitkan “instruksi pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali” kepada **Lembaga Pembiayaan** yang dengan cara mentransfer uang secara otomatis ke rekening **PENERIMA PESANAN**.
 - 4.11.3. Apabila proses permohonan fasilitas pembiayaan ditolak oleh **Lembaga Pembiayaan** karena alasan apapun juga, maka **PEMESAN** wajib memilih salah satu dari cara pembayaran lainnya yang ditawarkan oleh **PENERIMA PESANAN** yang saat itu sedang berlaku, namun jika **PEMESAN** bermaksud untuk membatalkan **Penegasan Pemesanan**, maka **PEMESAN** mengakui dan menyetujui bahwa seluruh pembayaran yang telah diterima oleh **PENERIMA PESANAN** tidak dapat ditarik kembali (dikembalikan) karena sebab apapun atau alasan apapun dan menjadi hak sepenuhnya dari **PENERIMA PESANAN**.
 - 4.11.4. Dalam hal **PEMESAN** lalai dalam melakukan pembayaran kepada Lembaga Pembiayaan yang atas keterlambatan tersebut cukup dibuktikan dengan pemberitahuan oleh Lembaga Pembiayaan kepada **PENERIMA PESANAN** maka seluruh ketentuan dan syarat mengenai keterlambatan pembayaran yang diatur dalam **Ketentuan dan Syarat** menjadi otomatis berlaku dan mengikat **PEMESAN**.
- 4.12. **PENERIMA PESANAN** serta **PEMESAN** sepakat bahwa untuk sahnya pembayaran yang dilakukan oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** harus mengikuti tatacara sebagai berikut :
 - 4.12.1. Agar **PEMESAN** tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran karena proses kliring, maka **PEMESAN** diminta membuka rekening pada Bank, agar dapat dilakukan perintah auto debit, sehingga **PEMESAN** cukup memastikan bahwa telah tersedia saldo dana yang mencukupi pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - 4.12.2. Pembayaran dengan bilyet giro harus diserahkan hanya pada kasir di kantor **PENERIMA PESANAN**.
 - 4.12.3. Pembayaran dengan transfer ditujukan ke rekening bank **PENERIMA PESANAN** diisi dan diberi penjelasan dengan data-data antara lain : nama, nomor **Konfirmasi Pesanan** dan mengirimkan fotokopi bukti transfer kepada **PENERIMA PESANAN** dengan email.
 - 4.12.4. Pembayaran secara tunai harus dilakukan oleh **PEMESAN** kepada Bank untuk ditujukan ke rekening **PENERIMA PESANAN**. **PEMESAN** tidak diperbolehkan untuk menyerahkan uang tunai kepada kasir maupun pihak siapapun yang mengatas namakan **PENERIMA PESANAN**.
 - 4.12.5. Pembayaran baru dianggap telah diterima oleh **PENERIMA PESANAN** jika uang yang dikliringkan/ditransfer ada dananya dan telah masuk ke dalam rekening **PENERIMA PESANAN**.
 - 4.12.6. Apabila pembayaran yang dilakukan oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** menyimpang dari cara-cara diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa cara pembayaran tersebut bukan merupakan suatu pembayaran yang sah dan oleh karenanya menjadi resiko dan tanggung jawab **PEMESAN** sepenuhnya dan **PENERIMA PESANAN** dibebaskan dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari **PEMESAN** berkenaan dengan hal-hal tersebut.

Pasal 5 **DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN**

Bilamana **PEMESAN** dengan alasan apapun ternyata tidak dapat atau terlambat melaksanakan satu atau beberapa pembayaran kepada **PENERIMA PESANAN** sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 4 **Ketentuan dan Syarat** ini, maka **PEMESAN** wajib membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar 0.5% (setengah persen) per bulan dari jumlah yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh **PEMESAN** dengan seketika dan sekaligus lunas. Ketentuan denda keterlambatan pembayaran tidak mengurangi hak **PENERIMA PESANAN** untuk memutuskan/membatalkan pemesanan ini, sebagaimana diatur pada Pasal 10 **Ketentuan dan Syarat** ini.

Pasal 6 **PENYERAHAN FISIK**

- 6.1 **PENERIMA PESANAN** menjamin dan mengikatkan diri untuk membangun serta menyelesaikan pembangunan **Unit**, untuk itu **PENERIMA PESANAN** mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada **PEMESAN**, **Unit** sesuai dengan Spesifikasi Unit dan dalam jangka waktu paling lambat pada **Tanggal Serah Terima**.
- 6.2. Yang dimaksud dengan penyelesaian pembangunan adalah **Unit** yang dipesan telah diselesaikan pembangunannya dan bangunan telah berfungsi/dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, yang meliputi utilitas, dinding pembatas, pintu-pintu, lantai, plafon, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam **Penegasan Pemesanan**. Apabila terdapat kekurangan atau benda-benda yang tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, maka hal tersebut tidak menghambat untuk dilakukannya serah terima, akan tetapi mengacu kepada ketentuan mengenai jaminan atas **Unit** (Warranty) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7.
- 6.3. **PENERIMA PESANAN** akan menyerahkan **Unit** kepada **PEMESAN**, dengan ketentuan **PEMESAN** yang memilih cara pembayaran tunai atau pembiayaan dari **Lembaga Pembiayaan** telah melunasi seluruh pembayarannya dan/atau melaksanakan segala kewajiban kepada **PENERIMA PESANAN**.

Dalam hal metode pembayaran yang dipilih **PEMESAN** adalah angsuran tunai bertahap kepada **PENERIMA PESANAN** dan dalam hal **PEMESAN** masih terdapat tunggakan-tunggakan, denda-denda, kewajiban-kewajiban berapapun jumlahnya dan apapun bentuknya, maka **PEMESAN** wajib segera melunasi dan menyelesaikan sampai tuntas dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak **Tanggal Serah Terima** atau tanggal lain yang tercantum dalam surat undangan serah terima, apabila lewat dari batas waktu tersebut, jika belum diselesaikan juga, maka kewajiban dan janji serah terima seperti yang disepakati pada **Konfirmasi Pesanan** atau tanggal lain yang tercantum dalam surat undangan serah terima, maka serah terima dianggap sudah dilaksanakan dengan baik oleh **PENERIMA PESANAN** tanpa memerlukan tandatangan **PEMESAN** dan tidak ada kewajiban bagi **PENERIMA PESANAN** untuk menyerahkan penguasaan dan kunci-kunci **Unit** kepada **PEMESAN** sebelum dilakukannya pelunasan dan penyelesaian kewajiban-kewajiban, sedangkan kewajiban **PEMESAN** untuk mulai menanggung dan membayar **Iuran Pengelolaan, Iuran Dana Cadangan, Biaya Penggunaan** dan iuran-iuran lainnya tetap berlaku dan wajib dilunasi dan **Masa Jaminan** berlaku sejak **Tanggal Serah Terima**.

- 6.4. Untuk **PEMESAN** yang memilih cara pembayaran apapun, bila sampai dengan **Tanggal Serah Terima** sebagaimana ditentukan dalam **Konfirmasi Pesanan** atau tanggal lain yang tercantum dalam surat undangan serah terima, kewajiban pembayaran telah dipenuhi oleh **PEMESAN** dengan tepat waktu dan tidak ada tunggakan pembayaran/kewajiban apapun, maka **Unit** akan diserahkan terimakan, namun **PEMESAN** yang memilih cara pembayaran angsuran melalui tunai bertahap wajib menandatangani Pinjam Pakai, yang berarti sebelum **Harga** lunas, **PEMESAN** meminjam-pakai atas **Unit** dan **PENERIMA PESANAN** tetap menjadi pemilik atas **Unit** tersebut sampai dengan pelunasan **Harga**, pada saat sudah dilakukan pelunasan pembayaran, tidak diperlukan lagi adanya proses serah terima.
- 6.5. Apabila oleh sebab apapun, kecuali:
 - 6.5.a. karena adanya permintaan dari **PEMESAN** sendiri untuk meminta perubahan-perubahan pada **Unit**;
 - 6.5.b. karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 22.**PENERIMA PESANAN** melalaikan kewajibannya tidak dapat menyelesaikan pembangunan dan menyerahkan **Unit** pada tanggal yang diperjanjikan dan telah melampaui masa tenggang waktu

perpanjangan, maka atas kelalaian tersebut :

- 6.5.1. **PEMESAN** secara tertulis dapat meminta **PENERIMA PESANAN** untuk menyerahkan **Unit** dengan kondisi apa adanya (*as is*).
- 6.5.2. **PENERIMA PESANAN** akan menghitung denda keterlambatan penyerahan **Unit** setiap 3 (tiga) bulan dan memberitahukan kepada **PEMESAN** pada bulan ke-4 (empat) setiap tanggal 20 (dua puluh), apabila tanggal 20 (duapuluh) jatuh pada hari libur, maka pemberitahuan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 6.5.3 **PENERIMA PESANAN** akan memperhitungkan denda keterlambatan penyerahan **Unit** sebesar 0.5% (setengah persen) per bulan maksimal 5% (lima persen) dari **Nilai Sisa Pekerjaan** atas **Unit** milik **PEMESAN**, yang dihitung secara proporsional terhadap bagian **Unit** yang belum terselesaikan dihitung sejak **Tanggal Serah Terima** sampai dengan tanggal undangan serah terima pertama yang dikirim **PENERIMA PESANAN**.
- 6.5.4 Bagi **PEMESAN** yang memilih pembayaran melalui angsuran tunai bertahap ke **PENERIMA PESANAN** dimana masih terdapat sisa **Harga** yang masih harus diangsur, maka denda keterlambatan dihitung 0.5 % (setengah persen) per bulan maksimal 5% (lima persen) dari **Nilai Sisa Pekerjaan** atas **Unit** dikalikan dengan persentase (%) nilai **Harga Net** angsuran yang sudah terbayar terhadap total nilai **Harga Net**.
- 6.5.5 Bagi **PEMESAN** yang memilih angsuran melalui **Lembaga Pembiayaan** yang sudah melakukan pelunasan/pencairan dana sepenuhnya kepada **PENERIMA PESANAN** dan tidak ada tunggakan maupun denda, maka denda keterlambatan penyerahan **Unit** dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan butir 6.5.2 diatas.
- 6.5.6 Pembayaran denda keterlambatan penyerahan **Unit** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.5.2, 6.5.3 dan 6.5.4 akan dilakukan oleh **PENERIMA PESANAN** pada **Tanggal BAST** dan telah menerima surat undangan serah terima, dengan ketentuan tidak ada tunggakan dan kewajiban apapun dari **PEMESAN** serta **PEMESAN** sudah melakukan pelunasan pembayaran sepenuhnya atas **Harga**.
Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila **PENERIMA PESANAN** memberitahukan keterlambatan kepada **PEMESAN**.
- 6.6. Dengan memperhatikan Pasal 6.3, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum penyerahan fisik tersebut dilakukan, **PENERIMA PESANAN** akan memberitahukan secara tertulis dan dibuktikan dengan tanda pengiriman kepada **PEMESAN** untuk datang ke tempat dan pada hari serta tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh **PENERIMA PESANAN**, untuk menandatangani **BAST**. **PEMESAN** dapat mengajukan penundaan penyerahan fisik paling lama 14 (empat belas) hari kalender dengan pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal serah terima yang tercantum dalam surat undangan. Dalam hal **PEMESAN** tidak hadir pada jangka waktu yang disebutkan diatas maka **PEMESAN** dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada **PENERIMA PESANAN** baik berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini, untuk bertindak atas nama **PEMESAN** menandatangani semua dokumen yang berhubungan dengan **BAST** tersebut.
- 6.7. Serah terima atas **Unit** kepada **PEMESAN** sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.6 diatas, dianggap telah terjadi secara otomatis karena kelalaian **PEMESAN**, sehingga tidak ada kewajiban bagi **PENERIMA PESANAN** untuk mengirimkan kembali surat undangan maupun menyerahkan kunci atas **Unit** tersebut kepada **PEMESAN**, sampai **PEMESAN** sendiri yang datang dan mengambil kunci di kantor **PENERIMA PESANAN** atau tempat lain yang disepakati.
- 6.8. Terhitung sejak tanggal **BAST** atau tanggal dianggap telah dilakukan **BAST**, **PEMESAN/Pemilik** atau **Penghuni** wajib menanggung dan membayar **Biaya Penggunaan** maupun **Iuran Pengelolaan, Iuran Dana Cadangan**, baik yang langsung terkait dengan **Klaster, Blok, Tower, Unit, Sub Komplek** atau **Komplek dan Fasilitas Bersama Komplek**.
- 6.9. Apabila setelah serah terima timbul tunggakan, denda/penalti keterlambatan pembayaran atas **Harga**, termasuk biaya dan denda atas **Iuran Pengelolaan, Iuran Dana Cadangan** dan lain-lain tagihan yang timbul dan belum dilakukan pelunasan oleh **PEMESAN**, maka **Masa Jaminan** 100 (seratus) hari yang

diberikan oleh **PENERIMA PESANAN** sebagaimana Pasal 7 dibawah ini menjadi tidak berlaku.

- 6.10. Apabila **PEMESAN** bermaksud melakukan modifikasi segera setelah serah terima dan sudah menunjuk kontraktor, maka kontraktor dapat menandatangani **BAST** mewakili sebagai kuasa **PEMESAN**. Dengan demikian kewajiban **PENERIMA PESANAN/PENGEMBANG** atas **Unit** tersebut berakhir dan beralih kepada kontraktor yang ditunjuk oleh **PEMESAN**.
- 6.11. Meskipun telah dilakukan serah terima **Unit**, akan tetapi pelaksanaan pembangunan di dalam **Komplek** dilakukan secara bertahap, tidak ada urutan dan dalam waktu serta cara yang tidak bersamaan, maka **PEMESAN** menyadari bahwa akan ada pekerjaan konstruksi yang akan terus berkelanjutan dan dapat menimbulkan polusi baik udara maupun suara, sehingga dapat mengganggu **Penghuni** untuk beraktivitas di dalam **Komplek**.
- 6.12. Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud Pasal 22 **Ketentuan dan Syarat** ini yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan **Unit** oleh **PENERIMA PESANAN** kepada **PEMESAN**, maka **PEMESAN** dengan ini melepaskan hak untuk menuntut pidana, perdata, dan /atau pembayaran denda atau ganti rugi atau biaya lain dalam bentuk apapun kepada **PENERIMA PESANAN**.

Pasal 7 **JAMINAN ATAS UNIT (WARRANTY)**

- 7.1. Masa Jaminan yang diberikan oleh **PENERIMA PESANAN** adalah selama 100 (seratus) hari kalender berturut-turut sejak **Tanggal BAST** atas **Unit**, sesuai dengan spesifikasi dan berfungsinya fasilitas-fasilitas yang ada di dalam **Unit** seperti saluran air bersih, air kotor, listrik dan lain-lain dalam jangka waktu tersebut, juga untuk perbaikan-perbaikan atas hal-hal yang tertulis di dalam **BAST**.
- 7.2. Seluruh jaminan atas **Unit** tidak berlaku lagi secara otomatis jika **Unit** telah diubah/direnovasi oleh **PEMESAN** ataupun **Penghuni**. Jaminan hanya berlaku selama **Unit** masih dalam kondisi standar atau seperti kondisi semula pada saat **Tanggal BAST**.
- 7.3. Apabila dalam **Masa Jaminan**, **PEMESAN** menemukan kerusakan-kerusakan atas **Unit** dan/atau tidak berfungsinya fasilitas-fasilitas dalam **Unit** atau pekerjaan ada yang belum terselesaikan, **PEMESAN** berhak meminta **PENERIMA PESANAN** untuk memperbaiki kerusakan tersebut dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh **PENERIMA PESANAN**, perbaikan mana harus telah mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak **PENERIMA PESANAN** menerima formulir permohonan perbaikan yang telah diisi lengkap.
- 7.4. Kewajiban **PENERIMA PESANAN** dalam **Masa Jaminan** ini dibatasi oleh desain dan spesifikasi **Unit** dan dapat dibuktikan bahwa kerusakan-kerusakan tersebut dan/atau tidak berfungsinya fasilitas-fasilitas tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian **PEMESAN** atau **Penghuni**, termasuk kesalahan dan/atau kelalaian yang timbul atas pekerjaan kontraktor yang ditunjuk oleh **PEMESAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 6.10.
- 7.5. Segala perubahan dan/atau penambahan yang dilakukan atas **Unit** harus memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PENERIMA PESANAN** dan harus dilaksanakan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** dan/atau kontraktor **PEMESAN** yang telah disetujui oleh **PENERIMA PESANAN** secara tertulis, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang timbul sehubungan dengan perubahan dan/atau penambahan menjadi resiko dan tanggung jawab **PEMESAN** asalkan perubahan dan atau penambahan tersebut tidak menimbulkan gangguan atau kerugian bagi **Unit** lainnya. Apabila timbul kerugian, maka **PEMESAN** harus bertanggungjawab sepenuhnya.

Pasal 8 **PAJAK-PAJAK DAN BIAYA-BIAYA**

- 8.1. Pajak-pajak wajib dibayar dan dipungut oleh **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk apabila terdapat perubahan-perubahan maupun penyesuaian perhitungan dan juga

denda-denda.

- 8.2. Terdapat bermacam-macam pajak-pajak yang terkait dengan pemesanan **Unit**, pembayaran DP, angsuran maupun saat jual beli, baik yang menjadi beban **PEMESAN/PEMBELI** maupun **PENERIMA PESANAN/PENJUAL**, dan juga ada pajak-pajak yang terjadi setelah jual beli, tetapi wajib dibayar oleh **Pemilik** dan/atau **Penghuni** yang berlaku sejak dilakukannya serah terima **Unit**, termasuk namun tidak terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- 8.3. Terdapat pajak dan biaya yang harus dibayarkan langsung oleh **PEMESAN/Pemilik** atau **Penghuni**, seperti biaya pemakaian listrik pada **Unit** atau dibayarkan secara proporsional dan dikoordinasikan oleh **PENERIMA PESANAN, PENGEMBANG, BP**, seperti biaya pemakaian listrik pada **Bagian Bersama**.
- 8.4. Terdapat juga pajak dan biaya yang sudah menjadi satu di dalam **Iuran Pengelolaan** seperti biaya keamanan dan **Iuran Dana Cadangan**, seperti biaya *overhaul lift*, perpanjangan **HGB Tanah Bersama**, tetapi ada juga yang ditagih secara terpisah, seperti sewa pemakaian **Benda Bersama** untuk keperluan pribadi **Penghuni**.
- 8.5. Jika karena suatu peraturan, ketentuan atau keadaan tertentu, **PENERIMA PESANAN** telah membayar lebih dahulu (namun **PENERIMA PESANAN** tidak berkewajiban untuk melakukan hal tersebut) suatu pajak, iuran, retribusi, biaya, ongkos maupun kewajiban pembayaran lainnya yang merupakan beban dan tanggung jawab **PEMESAN**. **PEMESAN** wajib untuk segera melunasi pembayaran dimaksud dengan seketika dan sekaligus lunas, dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kepada **PENERIMA PESANAN** atas pemberitahuan pertama dari **PENERIMA PESANAN**, dan apabila **PEMESAN** tidak juga melakukan pembayaran, maka **PENERIMA PESANAN** berhak mengenakan denda 1 o/oo (satu per mil) per hari untuk tiap-tiap hari keterlambatan sampai dengan dilunasinya kewajiban tersebut dan proses pengalihan hak serta Akta Jual Beli tidak dapat dilakukan, tanpa mengurangi hak **PENERIMA PESANAN** untuk melakukan sanksi-sanksi lain yang diatur dalam **Ketentuan dan Syarat** ini.

Pasal 9

PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI (AJB)

- 9.1. **Para Pihak** berjanji dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani AJB atas **Unit** dihadapan **PPAT**, dalam hal telah dipenuhi seluruh aspek-aspek sebagai berikut:
 - i. **PEMESAN** telah melunasi seluruh pembayaran **Harga**, kewajiban-kewajibannya, denda, sanksi administrasi dan biaya-biaya lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan**;
 - ii. Telah dilakukan **BAST** dan tidak ada tuntutan/gugatan apapun termasuk tunggakan **Iuran Pengelolaan, Iuran Dana Cadangan** dan biaya-biaya lainnya atas **Unit** yang diserahkan tersebut;
 - iii. **PEMESAN** telah memenuhi seluruh persyaratan/ peraturan / kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang, **AD/ART/Peraturan Tata Tertib Sarusun/Peraturan Tata Tertib Komplek**;
 - iv. **Sertipikat** telah diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - v. **PEMESAN** telah melunasi seluruh biaya untuk proses pengurusan balik nama **Sertipikat** ke atas nama **PEMESAN**, yang terdiri dari biaya resmi yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), pajak-pajak lain yang akan ada dikemudian hari yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perubahan atas nilai pajak yang telah berlaku pada saat ini, jasa pengurusan oleh notaris/**PPAT**, biaya-biaya lainnya untuk dapat dilakukannya proses pengurusan balik nama **Sertipikat** ke atas nama **PEMESAN**.
- 9.2. **PENERIMA PESANAN** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PEMESAN** untuk datang ke tempat pelaksanaan jual beli pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh **PENERIMA PESANAN**.
- 9.3. Segera setelah dilakukan penandatanganan AJB dihadapan **PPAT**, maka akan dilakukan proses balik nama **Sertifikat** menjadi atas nama **PEMESAN** oleh **PPAT**.
- 9.4. Apabila **PEMESAN** membeli **Unit** dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari **Lembaga Pembiayaan**, maka pada saat pelaksanaan AJB dihadapan **PPAT**, dilaksanakan juga penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) serta dokumen lain yang diperlukan. Selanjutnya **PENERIMA PESANAN** akan menyerahkan

seluruh asli dokumen sehubungan dengan jual beli **Unit**, termasuk tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan **Unit** tersebut sebagai jaminan kepada **Lembaga Pembiayaan** pemberi fasilitas pembiayaan.

- 9.5. Apabila dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari efektif terhitung sejak saat seharusnya dilaksanakan penandatanganan **AJB** dihadapan **PPAT**, **PEMESAN** tidak dapat hadir atau mengutus wakil/kuasanya dan tidak memberi kabar untuk menandatangani **AJB** tersebut, maka **PENERIMA PESANAN** akan (tetapi tidak berkewajiban) mengirimkan pemberitahuan kedua secara tertulis kepada **PEMESAN** untuk menandatangani **AJB** dihadapan **PPAT**.
- 9.6. Dalam hal kewajiban **PENERIMA PESANAN** untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PEMESAN** untuk menandatangani **AJB** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9.2 **Ketentuan dan Syarat** telah dipenuhi, maka **PENERIMA PESANAN** dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
- i. Apabila **PEMESAN** memenuhi undangan namun tidak mau menandatangani **AJB**, maka **PENERIMA PESANAN** akan menyerahkan asli **Sertipikat** tersebut kepada **PEMESAN** yang masih atas nama **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG** untuk disimpan sendiri oleh **PEMESAN**. Dengan diserahkannya asli **Sertipikat** tersebut kepada **PEMESAN**, maka segala resiko menjadi tanggungjawab **PEMESAN** sendiri dan membebaskan **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG** dari segala tuntutan/gugatan yang timbul, termasuk resiko perpanjangan **Sertipikat** dan biaya-biaya yang timbul menjadi beban **Pembeli**.
 - ii. Apabila **PEMESAN** tidak memenuhi undangan untuk menandatangani **AJB** meskipun telah diberitahukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, maka **PENERIMA PESANAN** dan/atau **PENGEMBANG** akan mengenakan biaya penitipan atau penyimpanan atas **Sertipikat** tersebut kepada **PEMESAN**.
- 9.7. Dalam hal sudah dapat dilakukan (memenuhi syarat) penandatanganan **AJB** dan **PEMESAN** telah diundang untuk menandatangani **AJB** dihadapan **PPAT**, yang dibuktikan dengan bukti pengiriman surat undangan dari **PENERIMA PESANAN** namun dengan alasan apapun tidak melakukan penandatanganan **AJB Unit**, maka apabila terjadi selisih Dasar Pengenaan Pajak akibat dari kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka seluruh selisih pajak dan/atau pajak-pajak yang timbul tersebut menjadi tanggungjawab dan wajib dibayar oleh **PEMESAN**.
- 9.8. **PEMESAN** sepenuhnya bertanggung jawab atas resiko-resiko/ kerugian-kerugian/ biaya-biaya yang dialami **PENERIMA PESANAN** sehubungan dengan kelalaian **PEMESAN** dalam melaksanakan **AJB** dengan membayar biaya kerugian sebesar 2 (dua) kali dari biaya-biaya yang dikeluarkan maupun biaya-biaya yang sepatutnya diterima oleh **PENERIMA PESANAN** termasuk namun tidak terbatas pada tidak dapat dicairkannya dana milik **PENERIMA PESANAN** oleh Lembaga Pembiayaan. Apabila 12 (dua belas) bulan sejak tanggal undangan **AJB PEMESAN** belum juga melaksanakan **AJB** maka **PEMESAN** dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada **PENERIMA PESANAN** berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini, untuk bertindak atas nama **PEMESAN** menandatangani semua dokumen yang berhubungan dengan **AJB** tersebut.
- 9.9. **Para Pihak** setuju bahwa walaupun **Para Pihak** telah memenuhi kewajibannya dalam **Penegasan Pemesanan** dan telah menandatangani **AJB**, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal **Ketentuan dan Syarat** yang tidak diatur dalam **AJB** tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak**. Oleh karena itu **PEMESAN** wajib menandatangani pernyataan penegasan bersamaan dengan penandatanganan **AJB**.

Pasal 10 **PEMUTUSAN PENEGASAN PEMESANAN**

- 10.1. **PENERIMA PESANAN** berhak untuk setiap saat memutuskan dan membatalkan **Penegasan Pemesanan** secara sepihak, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
- 10.1.a. **PEMESAN** lalai untuk memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dan disepakati dalam **Konfirmasi Pesanan** dan kelalaian itu berlangsung terus selama 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung sejak saat seharusnya kewajiban pembayaran dilaksanakan (jatuh tempo), dimana dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup akan kelalaian **PEMESAN** dan tanpa diperlukan lagi suatu surat peringatan secara resmi atau surat lain yang serupa dengan itu.
 - 10.1.b. **PEMESAN** yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari **Lembaga Pembiayaan** wajib

mengurus sendiri kepada **Lembaga Pembiayaan** agar pencairan fasilitas pembiayaan tidak melewati tanggal jatuh tempo sisa pembayaran. Keterlambatan pembayaran baik yang disebabkan oleh keterlambatan pengurusan maupun penolakan permohonan fasilitas pembiayaan merupakan bukti yang cukup atas kelalaian **PEMESAN** tanpa diperlukan suatu surat peringatan secara resmi atau surat lain yang serupa dengan itu.

- 10.1.c. **PEMESAN** baik atas permohonan sendiri atau atas permohonan pihak lain dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan (*curatele*) dan masih ada sisa kewajibannya kepada **PENERIMA PESANAN** atau **PEMESAN** mendapat larangan dari instansi Pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan usahanya.
- 10.1.d. Dalam hal **PEMESAN**:
- (i) adalah seorang individu, maka apabila **PEMESAN** meninggal dunia dan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak saat meninggalnya **PEMESAN**, para ahli warisnya tidak mematuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12.10, dimana dengan lewatnya waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal **PEMESAN** meninggal dunia, sudah merupakan bukti yang cukup akan ketidak sanggupan para ahli waris melanjutkan kewajiban hukum **PEMESAN** sepanjang masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN**.
 - (ii) adalah sebuah badan hukum, maka saat **PEMESAN** dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang, atau pemegang saham (atau yang setara dengan itu) **PEMESAN** mengambil keputusan pembubaran.
- 10.1.e. Seluruh atau salah satu kegiatan **PEMESAN** dibubarkan dan/atau kekayaan **PEMESAN** disita, diambil alih atau dikenakan tindakan lain oleh pengadilan dan/atau instansi pemerintah lainnya dan/atau pihak ketiga lainnya dan **PEMESAN** tidak mampu mengambil tindakan-tindakan untuk mengamankan kepentingan **PENERIMA PESANAN** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak adanya pembubaran, penyitaan, pengambilalihan atau pengenaan tindakan lainnya tersebut di atas, sepanjang masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN**.
- 10.1.f. Bagi **PEMESAN** yang memilih cara membayar angsuran dan/atau pembayaran atas **Unit** dengan menggunakan fasilitas pembiayaan melalui **Lembaga Pembiayaan**, dalam hal **PEMESAN** lalai (wanprestasi) melunasi hutangnya tersebut kepada **Lembaga Pembiayaan**, **PENERIMA PESANAN** selaku pihak yang ditunjuk oleh **Lembaga Pembiayaan** dapat mempergunakan hak/kewenangannya termasuk namun tidak terbatas pada pemutusan **Penegasan Pemesanan** secara sepihak.
- 10.1.g. **PEMESAN** tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam **Penegasan Pemesanan** berikut lampiran-lampirannya.
- 10.2. Akibat yang timbul dari adanya pemutusan **Penegasan Pemesanan** oleh **PENERIMA PESANAN** sebagai akibat kelalaian **PEMESAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 **Ketentuan dan Syarat** ini, maka:
- 10.2.a. **BF**, seluruh **DP**, dan **10% (sepuluh persen)** dari **Harga Net** tidak dapat dikembalikan, dan merupakan denda pembatalan.
 - 10.2.b. Pengembalian sisa uang yang telah dikurangi biaya-biaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.2.a diatas (apabila ada) kepada **PEMESAN** hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 10.2.b.i. Setelah dikurangi seluruh pajak-pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - 10.2.b.ii. Setelah **Unit** tersebut dipesan kembali oleh pihak lain sesuai dengan syarat, kondisi, cara, waktu dan harga yang sepenuhnya ditentukan dan dilaksanakan secara sepihak oleh **PENERIMA PESANAN** serta pembayaran lunas telah diterima oleh **PENERIMA PESANAN**.
 - 10.2.c. **PEMESAN** menyetujui untuk tidak menuntut pidana, perdata dan/atau kerugian moneter apa pun kepada **PENERIMA PESANAN** dan perusahaan afiliasinya termasuk tetapi tidak terbatas kepada karyawan-karyawan perusahaan.
 - 10.2.d. **Unit** yang menjadi obyek dari pemutusan **Penegasan Pemesanan** ini, yang sudah diserahkan maupun dipinjam pakaikan tetap merupakan milik **PENERIMA PESANAN** sepenuhnya dan oleh karenanya **PEMESAN** berkewajiban untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong dan baik (tidak ada kerusakan apapun) kepada **PENERIMA PESANAN**

selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari dan tanggal **Penegasan Pemesanan** menjadi batal dan seluruh biaya ongkos untuk mengosongkan **Unit** dan perbaikan-perbaikannya merupakan tanggung jawab dan beban sepenuhnya **PEMESAN**.

- 10.3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat-belas) hari terhitung sejak jatuh waktu pengosongan **PEMESAN** masih belum juga menyerahkan **Unit** dalam keadaan kosong dan baik (tidak ada kerusakan apapun) kepada **PENERIMA PESANAN**, maka **PENERIMA PESANAN** dengan ini diberikan izin (tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali) dan hak serta kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dalam Pasal 1813, 1814 dan 1815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia oleh **PEMESAN**, untuk mengosongkan **Unit** dan apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang untuk melakukan semua upaya hukum apapun yang diperlukan untuk menguasai kembali **Unit** dengan ketentuan bahwa segala tanggung jawab atas pembayaran biaya-biaya dan resiko yang timbul sehubungan dengan tindakan pengosongan dan perbaikan **Unit** tersebut yang dilakukan oleh **PENERIMA PESANAN** menjadi tanggung jawab **PEMESAN** sepenuhnya. Para Pihak dengan tegas sepakat bahwa tindakan pengosongan dan penyerahan yang dilakukan oleh **PENERIMA PEMESANAN** sebagaimana diatur dalam Pasal ini bukan dan tidak termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. **PEMESAN** dengan ini membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun atas hal tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan perdata dan/atau pidana) dan dengan ini memberikan pembebasan, pembebasan serta pelunasan kepada **PENERIMA PESANAN** (*acquit et decharge*). Sehubungan dengan hal tersebut, **PENERIMA PESANAN** berhak pula untuk memperhitungkan dan menagih kepada **PEMESAN** termasuk namun tidak terbatas pada denda pengosongan, tunggakan berikut biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengosongan **Unit**. Bagi **PEMESAN** yang memesan **Unit** secara angsuran dan menggunakan **Unit** berdasarkan Pinjam Pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 diatas, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1750 - 1751 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang mensyaratkan keputusan hakim untuk suatu pembatalan pinjam pakai dan pembatasan bahwa pinjam pakai tidak dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh pemilik barang.
- 10.4. Jika **PEMESAN** tidak segera mengosongkan **Unit** dalam jangka waktu telah ditentukan pasal 10.3, maka **PEMESAN** dengan ini memberikan hak, kewenangan dan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun juga kepada **PENERIMA PESANAN** untuk mematikan aliran listrik dan aliran air bersih/minum, sambungan telepon maupun menutup akses ke **Unit** tersebut. **PEMESAN** tidak berhak untuk menuntut/menggugat suatu kerugian dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun, dan apabila **PEMESAN** masih belum juga memperbaiki kesalahan dan belum menaati surat peringatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan tertulis ketiga, maka sebagai akibat dari pelanggaran peruntukan **Unit** tersebut, **PENERIMA PESANAN**, berhak untuk membongkar seluruh isi dari **Unit**. Seluruh biaya-biaya dan/atau kerugian yang timbul untuk pembongkaran tersebut adalah tanggung jawab **PEMESAN** dan wajib dilunasi seketika dalam waktu 1 x 24 jam kepada **PENERIMA PESANAN**.
- 10.5. **PEMESAN** tidak berhak memutuskan **Penegasan Pemesanan** secara sepihak dengan alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas karena **PENERIMA PESANAN** terlambat melakukan penyerahan **Unit**. Namun demikian dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 **Ketentuan dan Syarat** ini **PENERIMA PESANAN** berdasarkan pertimbangan khusus akan memberikan usaha terbaiknya untuk membantu **PEMESAN** agar dapat mengalihkan kepemilikan **Unit** kepada pihak lain dengan ketentuan:
- 10.5.a. **PEMESAN** terlebih dahulu mendaftarkan pengalihan **Unit** kepada **DRSS** agar **DRSS** dapat segera melakukan pemasaran **Unit**. Selama masa pemasaran sampai dengan pengalihan **Unit**, **PEMESAN** tetap wajib untuk memenuhi seluruh kewajibannya dalam **Penegasan Pemesanan**.
- 10.5.b. Pada tanggal efektif pengalihan kepemilikan **Unit** kepada pihak lain, **PEMESAN** wajib menyerahkan kembali kepada **PENERIMA PESANAN** seluruh dokumen-dokumen dan bukti-bukti pembayaran yang asli, dan kunci-kunci dan akses atas **Unit** yang telah diterbitkan oleh **PENERIMA PESANAN** dan menandatangani Addendum **Penegasan Pemesanan**;
- 10.5.c. Jumlah uang yang diterima oleh **PEMESAN** adalah sejumlah nilai pengalihan **Unit** yang disetujui oleh **PEMESAN** dikurangi pajak-pajak, biaya-biaya sehubungan dengan pengalihan **Unit** dan dikurangi denda-denda (jika ada), dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Addendum **Penegasan Pemesanan** dan pembayaran lunas diterima oleh **DRSS**.
- 10.6. Dengan ditanda tanganinya Addendum **Penegasan Pemesanan** sebagaimana disebut dalam Pasal 10.5 maka hubungan hukum Para Pihak berdasarkan **Penegasan Pemesanan** menjadi berakhir dan

PEMESAN membebaskan dan melepaskan hak untuk mengajukan gugatan, keberatan, tuntutan, laporan, keluhan (baik secara pidana dan/atau perdata dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun) terhadap **PENERIMA PESANAN** serta membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari dan terhadap setiap semua kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan hak **PENERIMA PESANAN**, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan hak **PENERIMA PESANAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 10.1.

- 10.7. **Para Pihak** dengan ini setuju bahwa keputusan **Penegasan Pemesanan** secara sepihak ini dapat dilakukan tanpa diperlukan campur tangan Hakim Pengadilan Negeri dan karenanya para pihak dengan ini secara tegas melepaskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang mensyaratkan keputusan hakim untuk suatu pembatalan suatu perjanjian/perikatan dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 11 **KEWAJIBAN PENERIMA PESANAN**

Kewajiban-kewajiban **PENERIMA PESANAN** berdasarkan **Penegasan Pemesanan** adalah dibatasi sebagai berikut:

- 11.1. Menyerahkan **Unit** kepada **PEMESAN**.
- 11.2. Membayar denda keterlambatan pembangunan dan serah terima **Unit** (jika ada).
- 11.3. Menandatangani AJB atas **Unit** dihadapan **PPAT**.

Satu dan lain dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban **PENERIMA PESANAN** lainnya yang secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal **Ketentuan dan Syarat** ini beserta seluruh lampiran **Penegasan Pemesanan**.

Pasal 12 **KEWAJIBAN PEMESAN**

Kewajiban-kewajiban **PEMESAN** berdasarkan **Penegasan Pemesanan** adalah dibatasi sebagai berikut:

- 12.1. Memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran **Harga**, pajak-pajak yang berdasarkan peraturan menjadi beban **PEMESAN**, biaya-biaya Notaris, bea-bea yang menjadi kewajiban **PEMESAN**, baik yang sudah dihitung seperti pada lampiran **Penegasan Pemesanan** maupun yang baru akan timbul dan wajib dibayar dikemudian hari.
- 12.2. Membayar denda keterlambatan.
- 12.3. Menerima dan menandatangani **BAST Unit**, Serah Terima Pinjam Pakai apabila masih ada angsuran yang belum jatuh tempo saat serah terima **Unit** sudah dapat dilakukan. **PEMESAN** dalam posisinya sebagai peminjam pakai atas **Unit**, wajib memelihara **Unit** sebagai peminjam pakai yang beritikad baik.
- 12.4. Mempergunakan **Unit** sesuai dengan peruntukannya.
- 12.5. Menandatangani AJB atas **Unit** dihadapan seorang **PPAT**.
- 12.6. Menaati **Peraturan Tata Tertib Sarusun** dan **Peraturan Tata Tertib Komplek** maupun peraturan tata tertib lainnya, yang sebagian diserahkan saat **Penegasan Pemesanan** ditandatangani beserta perubahan-perubahan yang berlaku dikemudian hari.
- 12.7. Menjadi anggota **P3SRS**.
- 12.8. Menyetujui penunjukan **BP**, sesuai dengan kondisi dan syarat-syarat yang telah disepakati atau dibuat oleh **PENGEMBANG** yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun.
- 12.9. Apabila diperlukan dan diminta oleh **PENERIMA PESANAN**, **PEMESAN** bersedia datang untuk menandatangani dokumen pengalihan hak tagih, serta dokumen pendukungnya lainnya, termasuk melengkapi data-data yg dibutuhkan dari **PEMESAN**.
- 12.10. Dalam hal **PEMESAN** adalah seorang individu, maka apabila **PEMESAN** meninggal dunia, para ahli waris **PEMESAN** harus menunjuk wakilnya yang sah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender

terhitung sejak **PEMESAN** meninggal dunia, untuk melanjutkan kewajiban hukum **PEMESAN**.

- 12.11. Bila **PEMESAN** mengalihkan, menyewakan, meminjamkan **Unit** ini kepada pihak lain, maka **PEMESAN** berkewajiban menyampaikan, mengingatkan dan meneruskan ketentuan-ketentuan dalam **Ketentuan dan Syarat** ini kepada penerima hak dari **PEMESAN**.
PEMESAN berkewajiban untuk memastikan penerima hak dari **PEMESAN** meneruskan hak dan kewajiban berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini dan karenanya pihak lain dimaksud akan menjadi **PEMESAN** dalam **Penegasan Pemesanan** menggantikan pihak yang menyerahkan atau yang memindahkan hak dan kewajibannya tersebut.
- 12.12. Dalam hal **PEMESAN** memilih metode pembayaran angsuran melalui tunai bertahap dan **PENERIMA PESANAN** melaksanakan hak-haknya berdasarkan ketentuan Pasal 4.9, Pasal 15.5 dan ketentuan hukum terkait lainnya untuk mengalihkan hak atas tagihan (hak atas angsuran) kepada pihak lain (termasuk bentuk pengalihan lainnya seperti sekuritisasi), **PEMESAN** dengan ini membebaskan dan melepaskan segala hak untuk menolak, mengajukan gugatan, keberatan, tuntutan, laporan, keluhan (baik secara pidana dan/atau perdata dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun) dan/atau klaim dalam bentuk apapun terhadap segala bentuk pengalihan yang dilakukan oleh **PENERIMA PESANAN**.
PEMESAN menyatakan dan berjanji akan tetap melaksanakan seluruh kewajiban pembayarannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini kepada pihak penerima pengalihan yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN**, dengan tanpa mengurangi hak **PENERIMA PESANAN** untuk melaksanakan segala hak yang disediakan oleh hukum untuk melindungi kepentingan **PENERIMA PESANAN**.

Satu dan lain dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban **PEMESAN** lainnya yang secara tegas disebutkan pada pasal-pasal dalam **Ketentuan dan Syarat** ini beserta seluruh lampiran **Penegasan Pemesanan**.

Pasal 13 **HAK PENERIMA PESANAN**

Hak-hak **PENERIMA PESANAN** dibatasi sebagai berikut:

- 13.1. Menerima pembayaran **Harga**, pajak-pajak, biaya-biaya dan bea-bea yang menjadi kewajiban **PEMESAN**, baik yang sudah dihitung seperti pada lampiran **Penegasan Pemesanan** maupun yang baru akan muncul, dihitung dan dibayar dikemudian hari, sesuai ketentuan-ketentuan dalam **Ketentuan dan Syarat** ini maupun peraturan perundangan yang berlaku.
- 13.2. Menunjuk Notaris/PPAT yang berwenang untuk melaksanakan AJB **Unit** yang akan ditandatangani oleh dan diantara **Para Pihak** berdasarkan Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat ini.
- 13.3. Menandatangani AJB di hadapan **PPAT** atas nama **PEMESAN** berdasarkan kuasa yang telah diterima oleh **PEMESAN** berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini, khususnya jika **PEMESAN** mengabaikan surat undangan dari **PENERIMA PESANAN**. Dalam hal ini posisi **PENERIMA PESANAN** adalah pihak yang dirugikan.
- 13.4. Membangun **Sub Komplek** dan **Komplek** termasuk seluruh pembangunan fasilitas, sarana dan pembangunan seluruh **Blok** yang ada dalam **Komplek** secara bertahap sesuai dengan waktu yang hanya ditentukan oleh **PENGEMBANG**.
- 13.5. Mengubah (termasuk menambah dan mengurangi) desain interior maupun exterior secara keseluruhan, termasuk namun tidak terbatas kepada meniadakan sebuah atau lebih dari sebuah bangunan tanpa mengubah tata letak **Unit** milik **PEMESAN** dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PEMESAN**. **PENGEMBANG** berhak untuk menentukan seluruh peruntukan dan intensitas pembangunan dalam **Sub Komplek, Komplek** maupun **Blok**.
- 13.6. Mengenakan dan menerima pembayaran denda apabila terjadi keterlambatan pada **PEMESAN**, atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh **PEMESAN** terhadap **Ketentuan dan Syarat** ini berikut seluruh lampiran-lampiran **Penegasan Pemesanan**.
- 13.7. Mengatur, membuat peraturan dan ketentuan apapun, mengelola sepenuhnya atas **Tanah Bersama, Bagian Bersama** dan **Benda Bersama Blok** maupun seluruh kawasan **Sub Komplek** dan **Komplek**

termasuk seluruh fasilitas penunjangnya.

- 13.8. Menuntut **PEMESAN** apabila tidak memenuhi hak dan kewajiban yang telah diatur dalam **Ketentuan dan Syarat** ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak-hak **PENERIMA PESANAN** lainnya yang secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal dalam **Ketentuan dan Syarat** ini beserta seluruh lampiran **Penegasan Pemesanan**.

Pasal 14 **HAK PEMESAN**

Hak-hak **PEMESAN** dibatasi sebagai berikut:

- 14.1. Menerima penyerahan hak dan penguasaan fisik **Unit** dari **PENERIMA PESANAN**, serta memperoleh perbaikan dalam hal terjadi kerusakan atas **Unit** selama **Masa Jaminan**.
- 14.2. Menuntut dan menerima pembayaran denda dari **PENERIMA PESANAN** atas keterlambatan pembangunan dan serah terima.
- 14.3. Menerima **Sertipikat** yang didaftar di atas nama **PEMESAN** apabila seluruh kewajiban telah terpenuhi.

Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak-hak **PEMESAN** lainnya yang secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal dalam **Ketentuan dan Syarat** ini beserta seluruh lampiran **Penegasan Pemesanan**.

Pasal 15 **PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN**

- 15.1. Dalam hal **PEMESAN** bermaksud mengalihkan atau memindahkan setiap dan seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini atau menyewakan, meminjamkan kepada pihak lain atau melakukan tindakan hukum berkenaan dengan **Unit** sebelum dilakukan penandatanganan AJB dihadapan **PPAT**, maka pengalihan atau pemindahan hak tersebut hanya dapat dilakukan setelah tahun ke-2 (kedua) terhitung sejak tanggal **Penegasan Pemesanan**, dan apabila pembayaran Unit kepada **PENERIMA PESANAN** telah dilunasi sepenuhnya oleh **PEMESAN**. Dengan demikian, maka setiap pengalihan atau pemindahan hak **PEMESAN** harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PENERIMA PESANAN**, persetujuan mana, dalam hal dimintakan, wajib diberikan apabila tidak ada dasar yang kuat untuk menolaknya. Jika pengalihan atau pemindahan setiap atau seluruh hak dan kewajiban tersebut dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari **PENERIMA PESANAN**, maka **PEMESAN** dengan ini memberikan hak, kewenangan dan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun juga kepada **PENERIMA PESANAN** untuk mematikan aliran listrik dan aliran air bersih/minum, sambungan telepon maupun menutup akses ke **Unit** tersebut sampai dengan diperoleh persetujuan dari **PENERIMA PESANAN**. **PEMESAN** tidak berhak serta melepaskan hak untuk menuntut/menggugat baik perdata dan/atau pidana dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun kepada **PENERIMA PESANAN**.

Sedangkan setiap tindakan hukum pengalihan atau pemindahan hak dan kewajiban dilakukan setelah ditanda-tanganinya AJB dihadapan **PPAT**, maka **PEMESAN** wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PENERIMA PESANAN** dan/atau **BP**. Pengalihan hak kepada pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk keseluruhan **Unit** yang dibeli, tidak boleh dialihkan hanya sebagian saja (dipecah sebagian).

- 15.2. Jika **PEMESAN** membayar **Harga Unit** yang sebagian dananya menggunakan fasilitas pembiayaan dari **Lembaga Pembiayaan**, dan sebelum terjadinya penandatanganan AJB sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ternyata timbul masalah antara **PEMESAN** dengan pihak **Lembaga Pembiayaan**, maka **PENERIMA PESANAN** atas permintaan **Lembaga Pembiayaan** berhak memblokir **Unit** tersebut. Jika **PEMESAN** ingin mengalihkan atau memindahkan hak dan kewajiban atas **Unit** tersebut, menyewakan atau melakukan tindakan hukum berkenaan dengan **Unit**, maka **PEMESAN** wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **Lembaga Pembiayaan** pemberi fasilitas tersebut. **PENERIMA PESANAN** selanjutnya berhak memutuskan untuk tidak melanjutkan penandatanganan AJB, hingga **PENERIMA PESANAN** memperoleh konfirmasi dari **Lembaga Pembiayaan**, bahwa masalah telah selesai.
- 15.3. Setelah memperoleh persetujuan **PENERIMA PESANAN** atas pengalihan termaksud pada Pasal 15.1,

PEMESAN wajib memenuhi segala kewajiban administrasi sebagaimana ditentukan oleh **PENERIMA PESANAN**, dan membayar biaya administrasi sebesar 5% (lima persen) dari **Harga** ditambah pajak-pajak paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak persetujuan dari **PENERIMA PESANAN** dan seluruh pembayaran **Harga** dan denda (apabila ada) telah lunas, kecuali apabila ketentuan pengalihan hak sebagaimana ketentuan Pasal 15.1 tidak dipenuhi oleh **PENERIMA PESANAN** maka 30% (tigapuluh persen) dari **Harga** akan hangus atau tidak diperhitungkan sebagai pembayaran **Harga**, atau jika pengalihan hak tersebut disebabkan karena warisan, pengalihan hak kepada suami/istri (*vice versa*), pengalihan hak kepada orang tua/anak (*vice versa*), maka untuk pengalihan yang pertama kali **PEMESAN** dibebaskan dari biaya administrasi tersebut, namun **PEMESAN** tetap berkewajiban untuk membayar segala kewajiban perpajakan yang timbul terkait dengan pengalihan tersebut.

- 15.4. Pihak ketiga yang menerima pengalihan termaksud pada Pasal 15.1 dari **PEMESAN** terikat secara otomatis sejak tanggal resmi pengalihan yang sah sepenuhnya pada ketentuan dalam **Penegasan Pemesanan** dan **Ketentuan dan Syarat** ini, semua hak dan kewajiban dari pihak yang mengalihkan akan diteruskan secara otomatis oleh pihak ketiga yang menerima pengalihan hak dan kewajiban berdasarkan **Penegasan Pemesanan** dan karenanya pihak ketiga dimaksud akan menjadi pihak didalam **Penegasan Pemesanan** menggantikan pihak yang menyerahkan atau memindahkan hak dan kewajibannya tersebut dan bilamana diperlukan untuk menandatangani kembali ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini.
- 15.5. Dengan tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 4.9, atas seluruh kewajiban pembayaran **PEMESAN** yang belum/akan jatuh tempo berikut denda dan selisih harga pilihan cara bayar (bila ada), **PENERIMA PESANAN** berhak untuk mengalihkan hak tagih terhadap kewajiban **PEMESAN** tersebut kepada pihak lain manapun, tanpa diperlukan adanya persetujuan dari **PEMESAN**. Setelah **PENERIMA PESANAN** memberikan pemberitahuan pengalihan kepada **PEMESAN**, **PEMESAN** tetap berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban **PEMESAN** berdasarkan **Penegasan Pemesanan** termasuk diantaranya kewajiban pembayaran angsurannya kepada pihak penerima pengalihan yang ditunjuk oleh **PENERIMA PESANAN** berdasarkan **Konfirmasi Pesanan**. **PENERIMA PESANAN** juga berhak untuk melakukan sekuritisasi (*asset securitization*) atas hak tagih yang belum jatuh tempo tersebut.

Pasal 16

PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA PESANAN

PENERIMA PESANAN menyatakan dan menjamin sebagai berikut:

- 16.1. **PENERIMA PESANAN** adalah pihak yang cakap bertindak hukum, dan tidak sedang dalam keadaan pailit.
- 16.2. **PENERIMA PESANAN** menyatakan bahwa **Unit** yang akan dijual dan diserahkan kepada **PEMESAN** berdasarkan **Penegasan Pemesanan** ini adalah milik dan dikuasai secara sah oleh **PENERIMA PESANAN** sepenuhnya, dan karenanya dapat dijual oleh **PENERIMA PESANAN**, dan pada saat dibuat dan ditandatangani AJB sebagaimana dimaksud Pasal 9, tidak sedang berada dalam sengketa dan tidak dikenakan sita jaminan oleh instansi yang berwenang dan **PENERIMA PESANAN** membebaskan **PEMESAN** dari segala tuntutan pidana, perdata dan kerugian moneter yang timbul dikemudian hari.
- 16.3. **Unit** yang akan dijual dan diserahkan kepada **PEMESAN** akan diserahkan dalam keadaan baik dan layak huni, dan **PENERIMA PESANAN** dapat dan mampu dan karenanya akan memenuhi dan menaati setiap dan seluruh kewajiban sebagaimana diatur dan dirinci didalam **Penegasan Pemesanan** tanpa ada yang dikecualikan, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure.
- 16.4. Dalam hal terjadi pengalihan hak tagih oleh **PENERIMA PESANAN**, maka seluruh isi dalam **Penegasan Pemesanan** ini tidak berubah dan tetap mengikat Para Pihak.

Pasal 17

PERNYATAAN DAN JAMINAN PEMESAN

PEMESAN menyatakan dan menjamin sebagai berikut:

- 17.1. **PEMESAN** adalah pihak yang cakap untuk bertindak hukum, tidak berada di bawah pengampunan dan tidak sedang menjalani dalam hukuman pidana / kurungan berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang

berwenang dan tidak sedang dalam keadaan pailit.

- 17.2. **PEMESAN** menyatakan bahwa dirinya memenuhi syarat untuk memiliki **Unit** berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila **PEMESAN** ternyata tidak memenuhi syarat maka segala akibat yang timbul menjadi tanggungan **PEMESAN** sendiri yang dengan ini membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari tanggung jawab tersebut dan apabila karena hal tersebut timbul kerugian pada **PENERIMA PESANAN** maka kerugian tersebut harus diganti oleh **PEMESAN**.
- 17.3. **PEMESAN** dapat dan mampu dan karenanya akan memenuhi dan menaati setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dirinci didalam lampiran ini berikut lampiran-lampirannya tanpa ada yang dikecualikan.
- 17.4. Bila **PENERIMA PESANAN** memutuskan **Penegasan Pemesanan** sesuai dengan ketentuan Pasal 10, maka **PEMESAN** tidak akan mengajukan tuntutan pidana maupun tuntutan perdata serta tuntutan ganti kerugian dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun, terhadap dan karenanya membebaskan **PENERIMA PESANAN** sepanjang mengenai hal tersebut.
- 17.5. Bila **PEMESAN** mengalihkan, menyewakan, meminjamkan **Unit** ini kepada pihak lain, maka **PEMESAN** berkewajiban menyampaikan, mengingatkan dan meneruskan ketentuan-ketentuan dalam **Ketentuan dan Syarat** ini kepada penerima hak dari **PEMESAN**. Pihak lainnya tersebut yang akan meneruskan hak dan kewajiban berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini dan karenanya pihak lain dimaksud akan menjadi **PEMESAN** dalam **Penegasan Pemesanan** menggantikan pihak yang menyerahkan atau yang memindahkan hak dan kewajibannya tersebut.
- 17.6. **PEMESAN** dengan ini menyatakan hanya **Unit** yang menjadi hak pribadi, tidak ada hak apapun atas **Sub Komplek, Komplek, Klaster, Blok**, baik dalam hal : nomer/kode, nama **Tower**, nama jalan, nama **Blok**, nama/nomor lantai, penampilan **Blok**, baik dari segi struktur, warna dan/atau disain interior maupun eksterior, alur lalu lintas, sekalipun sudah terbentuk **P3SRSS** tanpa ada batas waktu. Perubahan tersebut cukup dengan pemberitahuan dari **PENGEMBANG** dan **PEMESAN** tidak berhak untuk menuntut, baik secara perdata maupun pidana maupun tuntutan ganti kerugian dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun kepada **PENGEMBANG**.
- 17.7. **PEMESAN** dengan ini menjamin **PENGEMBANG** bahwa segala perselisihan apapun yang timbul terkait dengan **Penegasan Pemesanan** diselesaikan dengan prinsip itikad baik dan saling menghormati satu sama lain, termasuk diantaranya untuk tidak akan mengikuti dan/atau melakukan aksi demonstrasi/perkumpulan dalam bentuk apapun maupun melalui media apapun, baik yang dilakukan diluar maupun didalam **Tower, Blok, Klaster, Sub Komplek** dan **Komplek**. Setiap dan segala perselisihan yang timbul diselesaikan menurut ketentuan Pasal 24.

Pasal 18 **ASURANSI**

- 18.1. **PENGEMBANG** wajib mengasuransikan **Tower** dan bagian-bagiannya, pada suatu atau beberapa perusahaan asuransi yang *bonafide*, dilakukan selama pekerjaan fisik pembangunan **Tower** sampai dengan dilakukannya penyerahan fisik **Tower** sebagaimana dimaksud **Peraturan Rumah Susun** kepada **P3SRSS**.
- 18.2. Setiap asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 18.1 adalah untuk kontraktor *all risk* dan termasuk asuransi resiko terhadap pihak ketiga (*third party liabilities*) dan nilainya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan oleh **PENERIMA PESANAN** dari waktu ke waktu dan Premi asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 18.1 sepenuhnya menjadi beban dan tanggungan **PENGEMBANG**.
- 18.3. Dalam hal terjadinya resiko, maka dana yang diperoleh dari hasil claim asuransi harus dipergunakan untuk memperbaiki/ membangun kembali **Tower** dan/atau bagian darinya yang mengalami kerusakan, sehingga keadaan **Tower** dan/atau bagian darinya dapat dipulihkan kembali kepada keadaan sebelum terjadinya resiko.
- 18.4. Terhitung sejak **P3SRSS** terbentuk dan serah terima fisik **Tower** diserahkan kepada **P3SRSS** , maka segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi beralih secara otomatis menjadi kewajiban

PEMESAN, dimana premi asuransi dimaksud sepenuhnya menjadi beban dan tanggungan dari **PEMESAN**, yang dipungut dari **PEMESAN** melalui **Iuran Pengelolaan**. Sedangkan untuk asuransi barang-barang pribadi milik **PEMESAN** menjadi tanggung jawab dan kewajiban **PEMESAN** sepenuhnya untuk mengasuransikannya. **PENGEMBANG** tidak akan bertanggung jawab atas barang milik pribadi **PEMESAN** akibat apapun juga.

- 18.5. Bagi **PEMESAN** yang memilih cara pembayaran angsuran melalui tunai bertahap, baik melalui **Lembaga Pembiayaan** atau **PENERIMA PESANAN**, wajib menaati ketentuan yang dipersyaratkan berhubungan dengan asuransi barang-barang pribadi di dalam **Unit**, maupun asuransi jiwa dan kesehatan atas diri **PEMESAN** (dalam hal individu).

Pasal 19 **IURAN PENGELOLAAN DAN IURAN DANA CADANGAN UNIT**

- 19.1. **PEMESAN** dengan ini menerima dan menyetujui bahwa **BP** merupakan pengelola atas seluruh Komplek dan dengan demikian **BP** berhak menentukan besaran serta menerima pembayaran **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan** serta **PEMESAN** tidak berhak mengubah rumusan perhitungan besarnya **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan**, baik **Klaster, Blok, Tower, Unit, Komplek** maupun **Fasilitas Bersama Komplek**, serta mengikat sekalipun **AJB** sudah dilaksanakan dan telah terbentuk **P3SRS**. Biaya atas **Iuran Pengelolaan** tersebut tidak termasuk biaya parkir.
- 19.2. **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan** tersebut wajib dibayar oleh **PEMESAN/Pemilik** atau **Penghuni** terhitung sejak tanggal dilakukan **BAST** atas **Unit**. Dalam hal **PEMESAN** tidak berkehendak melaksanakan **BAST** pada tanggal yang telah ditentukan, maka berlaku ketentuan Pasal 6.6 diatas.
- 19.3. **Iuran Pengelolaan** wajib dibayar oleh **PEMESAN** yang jumlah, tanggal jatuh tempo dan nomor rekening bank, akan diberikan kemudian oleh **BP** dan/atau **PENGEMBANG** . Demikian juga untuk **Iuran Dana Cadangan** wajib dibayar bersamaan dengan **Iuran Pengelolaan**.
- 19.4. **PEMESAN** berjanji dan mengikatkan diri untuk tunduk dan patuh serta menyerahkan penetapan perhitungan **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan** kepada **BP** dan/atau **PENGEMBANG** dan **PEMESAN** menyetujui bahwa perhitungan **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan** dihitung berdasarkan rumus **Luas Semi Gross**.
- 19.5. Dalam hal terjadi keputusan **Penegasan Pemesanan** oleh **PENERIMA PESANAN** maupun dilakukan keputusan oleh **PEMESAN** sendiri, maka apabila ada tunggakan-tunggakan, denda-denda atas **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan**, maka **PENGEMBANG** berhak untuk memotong langsung dari jumlah uang yang akan dikembalikan kepada **PEMESAN** sebagai akibat keputusan **Penegasan Pemesanan** ini.
- 19.6. **PENGEMBANG** berhak menunjuk auditor independen untuk melakukan audit keuangan dari **P3SRS** dan **BP** dan biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **P3SRS**.

Pasal 20 **PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SARUSUN** **DAN BADAN PENGELOLA UNIT SARUSUN**

- 20.1. **PEMESAN** mengetahui dan menyetujui bahwa di dalam **Klaster** dapat terdiri dari beberapa **Blok** yang berbeda sub **P3SRSS / P3SRS**, termasuk dalam **Sub Komplek** atau **Komplek** yang bisa terdiri lebih dari 1 (satu) sub **P3SRSS/P3SRS**, tetapi tetap mengacu pada 1 (satu) **P3SRSS/P3SRS**. Untuk menjaga keindahan, keamanan dan ketertiban **Klaster, Sub Komplek** maupun **Komplek**, sesuai dengan yang dikonsepsikan oleh **PENGEMBANG**. **PEMESAN** dengan penuh kesadaran dan pengertian menyetujui untuk memberi hak dan menunjuk **PENGEMBANG** atau **BP** atau perusahaan lain yang ditunjuk oleh **BP** sebagai pengelola **Sarusun** selama **P3SRS** belum terbentuk secara sah maupun sesudah terbentuknya **P3SRS** secara sah dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan **AD/ART** dan selanjutnya apabila **PEMESAN** atau wakilnya duduk sebagai pengurus pada **P3SRS**, wajib menerima dan melaksanakan serta mendengar masukan dan saran dari **PENGEMBANG, BP** atau pihak yang ditunjuk oleh **BP** untuk

menjadi pengelola.

- 20.2. **PEMESAN** dengan ini berjanji dan mengikatkan diri sejak penandatanganan **Penegasan Pemesanan** bahwa **PENGEMBANG** selaku penyelenggara pembangunan berhak membentuk dan bertindak sebagai pengurus **P3SRS** termasuk membentuk suatu komite atau perwakilan untuk melaksanakan musyawarah, menggunakan hak suara serta mengambil keputusan dalam pembentukan **P3SRS** serta melaksanakan hak-hak **PEMESAN** sebagai anggota **P3SRS** sesuai dengan undang-undang maupun ketentuan hukum yang berlaku dari waktu ke waktu.
- 20.3. **PEMESAN** berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini menunjuk **BP** untuk melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pengoperasian **Sarusun** dan merupakan satu-satunya pihak yang berhak mengelola **Sarusun**.
- 20.4. **PENGEMBANG** dan **PEMESAN** sepakat bahwa pada saat pembentukan **P3SRS** pertama kali, waktu dan tata cara pelaksanaan ditetapkan atau diatur oleh **PENGEMBANG** dan pelaksanaan rapat dan/atau pengambilan keputusan seluruhnya ditentukan sebesar lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari **NPP**, dalam hal quorum tidak dapat tercapai karena suatu sebab, maka **PEMESAN** telah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada **PENGEMBANG** berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** ini untuk mengatur proses pembentukan, tata cara dan aturan lain yang berkaitan dengan pembentukan **P3SRS** dimaksud, termasuk namun tidak terbatas untuk merumuskan dan membentuk **AD/ART**.
- 20.5. Hanya **PEMESAN** yang sah atas **Unit** yang dibuktikan dengan **Sertipikat** atas namanya yang berhak untuk berpartisipasi dalam voting pengurus **P3SRS**. Selama **PEMESAN** belum melakukan balik nama **Sertipikat** atas namanya, maka **PEMESAN** tidak berhak berpartisipasi dalam voting penunjukan pengurus **P3SRS**.

Pasal 21 **PARKIR UNIT**

- 21.1. Dalam hal ditentukan bahwa **PEMESAN** mendapatkan Lot Parkir, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 21.1.a. **PEMESAN** sepakat bahwa yang dimaksud dengan Area Parkir adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1.2 Ketentuan dan Syarat ini, dan dengan demikian seluruh ketentuan perpajakan di Area Parkir tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan Perparkiran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1.2 Ketentuan dan Syarat ini.
 - 21.1.b. **PENGEMBANG** menyediakan Lot Parkir untuk **PEMESAN** di Area Parkir. Namun demikian lokasi Lot Parkir tidak secara khusus disediakan bagi **PEMESAN**. Penggunaan Lot Parkir tersebut diberikan kepada **PEMESAN** dengan hak pakai (**bukan dimiliki oleh PEMESAN**) dan melekat pada **Unit**, tidak dapat dialihkan secara terpisah dari **Unit**. Dalam hal kepemilikan **Unit** beralih, maka hak pakai atas unit Lot Parkir otomatis juga beralih. Area Parkir (termasuk Lot Parkir) sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Perparkiran dan/atau pihak lain yang ditunjuk atau diberikan kewenangan oleh Perusahaan Perparkiran sebagai pihak yang dapat menguasai Area Parkir atau Lot Parkir.
 - 21.1.c. Penggunaan Lot Parkir hanya boleh dipergunakan untuk kendaraan yang memenuhi standar ketinggian dan syarat-syarat teknis lain yang ditentukan oleh **PENGEMBANG** dan/atau Perusahaan Perparkiran yang diatur lebih lanjut dalam **Peraturan Tata Tertib Komplek** dan/atau **Tatib Sarusun**.
 - 21.1.d. Dalam hal **PEMESAN** memerlukan Lot Parkir tambahan, maka hal tersebut tergantung pada ketersediaan Lot Parkir dan **PEMESAN** dapat menyewa Lot Parkir dari Perusahaan Perparkiran atau pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Perparkiran dengan membayar biaya operasional dan biaya sewa yang berlaku dan yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan Perparkiran.
 - 21.1.e. **PEMESAN** wajib memenuhi syarat dan ketentuan pemakaian serta penggunaan Lot Parkir sesuai yang berlaku Area Parkir dan yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan Perparkiran.
 - 21.1.f. **PEMESAN** tetap wajib membayar biaya operasional atas pemakaian Lot Parkir di Area Parkir sebagai kontribusi atas pengelolaan yang dilakukan oleh Perusahaan Perparkiran dalam mengelola Area Parkir. Biaya operasional di Area Parkir akan ditetapkan dari waktu ke waktu

oleh Perusahaan Perparkiran.

- 21.2. Dalam hal tidak ditentukan bahwa **PEMESAN** mendapatkan Lot Parkir, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 21.2.a. **PEMESAN** sepenuhnya menyetujui bahwa **PEMESAN** tidak berhak dan tidak memiliki Area Parkir apapun di dalam Komplek.
 - 21.2.b. Seluruh Area Parkir di dalam Komplek dan segala hak melekat pada Area Parkir sepenuhnya dan secara khusus dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Perparkiran.
 - 21.2.c. **PEMESAN** secara khusus mengetahui bahwa **PEMESAN** tidak memiliki hak untuk menuntut dalam bentuk dan kondisi apapun atas sebagian maupun seluruh Area Parkir di dalam Komplek.
 - 21.2.d. Segala bentuk penawaran dan/atau penyewaan di Area Parkir dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibuat dan ditentukan oleh Perusahaan Perparkiran.
 - 21.2.e. **PEMESAN** dapat menyewa Lot Parkir dari Perusahaan Perparkiran.
- 21.3. **PEMESAN** dengan ini menyadari, mengetahui dan menyetujui bahwa Area Parkir tidak termasuk yang diperjualbelikan antara **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN**. **PEMESAN** dengan ini menyerahkan hak **PEMESAN** untuk memiliki, menguasai dan mengelola Area Parkir dan menunjuk Perusahaan Perparkiran untuk melakukan pengelolaan serta menetapkan ketentuan dan syarat penggunaan Area Parkir dari waktu ke waktu.
- 21.4. **PEMESAN** dengan ini menyadari, mengetahui dan menyetujui bahwa jumlah, peruntukan dan pengaturan di Area Parkir dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa diperlukan adanya persetujuan apapun dari **PEMESAN**. **PEMESAN** tidak berhak menuntut, turut campur dalam pengelolaan/pengoperasian Area Parkir.
- 21.5. **PENERIMA PESANAN** mengetahui dan menyatakan bahwa Perusahaan Perparkiran mempunyai hak penuh untuk menentukan besarnya tarif parkir berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serta menetapkan ketentuan perparkiran, dimana segala pendapatan perparkiran adalah hak Perusahaan Perparkiran.
- 21.6. Pengelola parkir dalam mengoperasikan Area Parkir memerlukan biaya operasional, yang akan dibebankan kepada semua pemakai (termasuk **PENERIMA PESANAN** dan/atau **Penghuni**) secara prorata dan wajib dibayar oleh setiap pemakai Area Parkir (termasuk **PENERIMA PESANAN** dan/atau **Penghuni**). Keterlambatan akan dikenakan sanksi berupa tidak mendapatkan akses masuk parkir. Biaya operasional bukan merupakan biaya sewa parkir. Apabila **Pemilik Unit** atau **Penghuni** membutuhkan lebih dari 1 (satu) unit Lot Parkir, maka hal tersebut tergantung pada ketersediaan Lot Parkir. **Pemilik Unit** dapat menyewa tambahan Lot Parkir dengan membayar biaya sewa ditambah dengan biaya operasional yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan Perparkiran.
- 21.7. **PEMESAN** dengan ini menyadari, mengetahui dan menyetujui bahwa jumlah Area Parkir tidak semata-mata diperuntukkan bagi **PEMESAN** dan/atau **Penghuni**.
- 21.8. **PEMESAN** dengan ini menyadari, mengetahui dan menyetujui bahwa seluruh sistem parkir baik meliputi akses parkir secara elektronik maupun manual, perlengkapan parkir seperti boom gate dan rolling door (apabila ada), sepenuhnya merupakan milik Perusahaan Perparkiran dan tidak termasuk dalam Benda Bersama maupun Bagian Bersama.

Pasal 22

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 22.1. **Para Pihak** secara tegas menyetujui bahwa **PENERIMA PESANAN** termasuk seluruh afiliasinya dan karyawan-karyawannya tidak akan bertanggung jawab dan/atau dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dan/atau tuntutan ganti kerugian dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun untuk bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan atau kesalahan untuk memenuhi suatu atau beberapa kewajibannya sebagaimana dirinci di dalam **Penegasan Pemesanan**, khususnya untuk menyelesaikan pembangunan **Unit** seperti waktu yang disepakati, apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut diakibatkan oleh kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan/dielakkan atau berada di luar kemampuan **PENERIMA PESANAN** untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut ("**Force Majeure**").
Kejadian atau peristiwa dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembatalan pembatalan perijinan

yang sudah diperoleh dari pemerintah, yang diluar kendali atau tanpa adanya kesalahan dari **PENERIMA PESANAN**, yang semata-mata karena perubahan kebijakan pemerintah atau putusan Pengadilan, tidak tersedianya bahan bangunan untuk penyelesaian pembangunan **Unit**, baik yang disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi dan politik pemerintah maupun kondisi ekonomi global, kecelakaan, peristiwa alam/ kejadian di luar kekuasaan manusia, huru-hara, gempa bumi, gunung meletus, penyakit flu-burung, penyakit SARS, racun *Ánthrax*, epidemi, kebakaran, banjir, tornado, typhoon, eksplosi, banjir lumpur, aksi dari serangan teroris, *suicide bombing* / bunuh diri, pemogokan, perang, perubahan peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis, perubahan kebijakan pemerintah, gerakan politik, kudeta dalam pemerintahan, demonstrasi, belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur, gugatan pada Sertipikat tanah yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, gugatan yang tidak beralasan pada **Tanah Bersama** atau tanah lainnya di lingkungan **Sub Komplek** atau **Komplek, Klaster, Blok, Tower** (misalnya karena mafia tanah) (mafia tanah), jatuhnya kapal terbang atau helikopter, kekacauan sosial, bencana alam dan kematian/kecelakaan atas karyawan-karyawan perusahaan maupun afiliasinya.

- 22.2. Didalam hal terjadinya suatu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 22.1, **Para Pihak** secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri, dengan dilandasi itikad baik akan melakukan setiap dan seluruh upaya dan usaha semaksimal mungkin agar kejadian atau peristiwa tersebut dapat dihindarkan / berakhir atau paling sedikit akibat kerugian dari kejadian atau peristiwa dimaksud ditekan dalam waktu yang secepat mungkin.
- 22.3. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan Pasal 22.2 di atas, apabila terjadi suatu perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam penafsirannya atau pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang sehingga pemberian fasilitas/metode pembayaran angsuran melalui tunai bertahap yang diberikan oleh **PENERIMA PESANAN** kepada **PEMESAN** berdasarkan **Penegasan Pemesanan** menjadi (i) melanggar ketentuan yang berlaku dan/atau (ii) menurut diskresi **PENERIMA PESANAN** terdapat konsekuensi-konsekuensi lanjutan apapun yang memberatkan dan/atau merugikan kegiatan usaha utama **PENERIMA PESANAN** selaku **PENGEMBANG** Properti, maka kewajiban **PENERIMA PESANAN** untuk memberi/mempertahankan fasilitas tunai bertahap kepada **PEMESAN** dengan sendirinya berakhir dan **PENERIMA PESANAN** berhak dengan pemberitahuan tertulis kepada **PEMESAN** meminta **PEMESAN** untuk segera melunasi kewajiban seluruh pembayaran yang seketika menjadi jatuh tempo. **PENERIMA PESANAN** berdasarkan pertimbangan sendiri dapat mengalihkan piutang kepada pihak ketiga tanpa memerlukan persetujuan **PEMESAN**. Pelunasan dan/atau pembiayaan kembali atas kewajiban-kewajiban **PEMESAN** tersebut wajib telah diselesaikan oleh **PEMESAN** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis yang terkait disampaikan oleh **PENERIMA PESANAN**. Apabila pelunasan dan/atau pembiayaan kembali tersebut tidak diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan, **PEMESAN** dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa **PENERIMA PESANAN** berhak untuk membatalkan **Penegasan Pemesanan** sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan melaksanakan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam **Ketentuan dan Syarat** .

Pasal 23 **PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tawaran permintaan, persetujuan dan bentuk **Penegasan Pemesanan** lain sehubungan dengan **Penegasan Pemesanan** ini akan dilakukan secara tertulis dengan menggunakan sarana media sebagaimana ditentukan pada halaman depan **Penegasan Pemesanan** ini. Dalam hal terjadi perubahan alamat, maka wajib diberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan dilakukan. Segala resiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan melalui media tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan.

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tawaran, permintaan, persetujuan dan bentuk **Penegasan Pemesanan** lain sehubungan dengan **Penegasan Pemesanan** ini dianggap telah di terima oleh pihak lainnya :

- (i). pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak di poskannya apabila dikirim dengan surat tercatat atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila di tanda tangani oleh pihak-pihak yang berhak mewakili **PENERIMA PESANAN** atau **PEMESAN**;
- (ii). pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui faksimili/email yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim;
- (iii). tanda terima bukti pengiriman melalui jasa pengiriman merupakan bukti yang sah bahwa surat-surat

maupun dokumen-dokumen telah diterima oleh **PEMESAN**.

Pasal 24 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 24.1. Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul diantara **Para Pihak** sebagai akibat **Penegasan Pemesanan** dan/atau setiap dan seluruh **Penegasan Pemesanan** /dokumen yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari **Penegasan Pemesanan** dengan segala akibat dan pelaksanaannya, maka **Para Pihak** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa ada campur tangan dari Pihak Ketiga manapun (termasuk namun tidak terbatas kepada seluruh media komersil apapun juga) dalam perselisihan tersebut yang dapat memperkeruh perselisihan. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai dalam waktu 60 (enam-puluh) hari setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis adanya perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk memilih penyelesaiannya melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana **PENERIMA PESANAN** berdomisili. **Para Pihak** menyetujui sepenuhnya untuk tidak memberitakan dan/atau memberitahukan perselisihan antara **PENERIMA PESANAN** dan **PEMESAN** kepada siapapun, umum/khalayak ramai melalui seluruh media apapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada media televisi, media surat kabar, koran, majalah, radio, dan/atau media cetak lain-nya termasuk namun tidak terbatas kepada bahan promosi seperti flyers, spanduk, umbul-umbul, baliho, *outdoor billboard* dan lain-lainnya. **Para Pihak** saling menjamin kerahasiaan dari pada informasi dan data-data yang diberikan oleh **PENERIMA PESANAN** dan **PEMESAN** kepada pihak manapun pada setiap saat untuk selamanya.
- 24.2. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyelenggaraan persidangan akan ditanggung oleh pihak yang mengajukan tuntutan.
- 24.3. **Penegasan Pemesanan** tunduk pada asas konsensualitas dan hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 24.4. Sehubungan dengan ketentuan pasal 24.3 diatas maka, **PEMESAN** menyadari, mengetahui dan menyetujui bahwa hubungan Para Pihak dalam **Penegasan Pemesanan** bukan merupakan hubungan antara kreditur dengan debitur sehingga dalam kondisi apapun tidak ada hutang – piutang yang timbul dari Penegasan Pemesanan, sehingga tidak akan ada pengajuan gugatan pidana maupun gugatan pailit atas sebab apapun berdasarkan pelaksanaan Penegasan Pemesanan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 25 **KUASA-KUASA**

Ketentuan mengenai kuasa-kuasa yang diberikan oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** yang telah dinyatakan dalam **Ketentuan dan Syarat** ini, termasuk: (i) kuasa-kuasa untuk melaksanakan serah terima dan menandatangani seluruh dokumen sehubungan **BAST** sesuai ketentuan Pasal 6.6 **Ketentuan dan Syarat** ; (ii) kuasa untuk mengatur proses pembentukan, tata cara dan aturan lain yang berkaitan dengan pembentukan **P3SRS** termasuk pembentukan komite/perwakilan untuk membentuk **P3SRS** sesuai ketentuan Pasal 20.2 dan 20.4 **Ketentuan dan Syarat** ; serta (iii) kuasa untuk menandatangani **AJB** di hadapan **PPAT** atas nama **PEMESAN**, khususnya jika **PEMESAN** mengabaikan surat undangan dari **PENERIMA PESANAN** sesuai ketentuan Pasal 13.3 **Ketentuan dan Syarat**, (iv) kuasa-kuasa untuk menetapkan **Iuran Pengelolaan** dan **Iuran Dana Cadangan** sesuai dengan ketentuan Pasal 19.4 **Ketentuan dan Syarat**, berlaku sebagai kuasa yang sah dari **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN**, sehingga dengan demikian mengikat **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN** tanpa diperlukan suatu surat kuasa terpisah lagi. Apabila disyaratkan surat kuasa secara terpisah, **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN** secara tegas memberlakukan **Ketentuan dan Syarat** ini sebagai surat kuasa yang sah serta mengikat **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN** untuk dilaksanakan sesuai ketentuan

Ketentuan dan Syarat ini.

PASAL 26
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- 26.1. Ketentuan tentang kewajiban **PEMESAN** yang diatur dalam Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum, akan tetapi tidak diatur dalam AJB yang akan ditandatangani oleh **Para Pihak** dihadapan **PPAT** akan tetap mengikat **PEMESAN** setelah penandatanganan AJB tersebut.
- 26.2. Dalam hal **PEMESAN** adalah warga negara atau badan hukum asing, maka **Para Pihak** setuju :
- a) **PENERIMA PESANAN** tidak menjamin bahwa **PEMESAN** dapat memiliki hak dengan Hak Guna Bangunan atas **Tanah Bersama** dan bahwa **PEMESAN** mengetahui bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini **PEMESAN** tidak dapat memiliki dengan hak tersebut.
 - b) Bahwa **Para Pihak** membuat **Penegasan Pemesanan** dengan pengertian bahwa Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan Undang-Undang Rumah Susun No. 20/2011 akan berubah dengan memberikan peluang kepada warga negara atau badan hukum asing dan bahwa pengaturan ini bersifat sementara adanya dan dengan memperhatikan Pasal 15.1 **Ketentuan dan Syarat**, **PEMESAN** dapat mengalihkan hak-haknya dalam **Penegasan Pemesanan** kepada pembeli warga negara Indonesia.
 - c) Jika **PEMESAN** memilih hanya menikmati **Unit** dari pada memiliki hak kepemilikan yang sah maka kepemilikan **Unit** akan tetap berada pada **PENERIMA PESANAN** dengan suatu **Penegasan Pemesanan** tersendiri diantara **Para Pihak**.
 - d) Pajak-pajak dan biaya-biaya, serta ongkos-ongkos berkenaan dengan pengalihan hak atas **Unit** kepada **PEMESAN** atau wakil yang ditunjuk oleh **PEMESAN** atau kepada Pihak Ketiga yang membeli **Unit** tersebut menjadi tanggungan **PEMESAN** termasuk pajak yang timbul apabila hak kepemilikan tersebut tetap berada pada **PENERIMA PESANAN**, karena kelalaian **PEMESAN**.
- 26.3. **Penegasan Pemesanan** tidak berakhir dengan meninggalnya atau bubarnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dan beralih secara otomatis kepada ahli waris, penerus hak dan kewajiban atau pengganti hak dan kewajiban dari pihak yang meninggal atau bubar. Ahli waris, penerus hak dan kewajiban atau pengganti hak dan kewajiban dari pihak yang meninggal atau bubar menerima pengalihan atas hak dan kewajiban berdasarkan **Ketentuan dan Syarat** dan karenanya akan menjadi pihak dalam **Penegasan Pemesanan** menggantikan pihak yang mengalihkan.
- 26.4. **Penegasan Pemesanan** secara otomatis menggantikan seluruh kesepakatan **Para Pihak** baik yang dibuat secara tertulis diantaranya yang terdapat pada brosur maupun lisan yang telah ada sebelumnya termasuk tetapi tidak terbatas keterangan-keterangan yang diberikan oleh **PENERIMA PESANAN** dan/atau karyawan **PENERIMA PESANAN** dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan **PENERIMA PESANAN**, dan memuat seluruh kesepakatan **Para Pihak** tentang pemesanan **Unit** dan **Penegasan Pemesanan** hanya dapat diubah dengan kesepakatan tertulis oleh dan di antara **Para Pihak**, kecuali yang secara jelas dinyatakan sebagai hak **PENGEMBANG**.
- 26.5. **Para Pihak** sepakat bahwa batalnya demi hukum atau pembatalan salah satu ketentuan dalam **Penegasan Pemesanan** tidak akan mengakibatkan batalnya atau pembatalan ketentuan-ketentuan lain di dalam **Penegasan Pemesanan** berikut lampiran-lampirannya, dan **Para Pihak** berkewajiban untuk mengganti ketentuan yang batal atau yang dibatalkan tersebut dengan suatu ketentuan lain yang sah menurut hukum dan sejauh dan sedapat mungkin mencerminkan dan tujuan komersil dari ketentuan yang batal atau dibatalkan tersebut.
- 26.6. Sekalipun **PENERIMA PESANAN** telah memberikan jaminan sepenuhnya kepada **PEMESAN**, akan tetapi mengingat kondisi secara umum usaha *Real Estate* yang beresiko terhadap tuntutan pihak ketiga dikemudian hari, dimana tuntutan pihak ketiga tersebut terhambat penyelesaiannya, maka **PENERIMA PESANAN** dengan itikad baik sampai dengan ditanda tangannya AJB menyatakan bertanggungjawab dan bersedia untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh **PEMESAN** kepada **PENERIMA PESANAN** ditambah dengan ganti rugi maksimal sebesar 3% (tiga persen) dari **Harga**. Dalam hal demikian, maka **PEMESAN** dengan itikad baik wajib untuk mengembalikan/menyerahkan kembali **Unit** kepada **PENERIMA PESANAN** dengan membebaskan **PENERIMA PESANAN** dari tuntutan pidana, perdata maupun berupa apapun juga dikemudian hari. Hak opsi untuk membatalkan **Penegasan Pemesanan** ini sepenuhnya berada ditangan **PENERIMA PESANAN**.

- 26.7. **PENERIMA PESANAN** hanya mengakui **PEMESAN** sebagai pihak dalam **Penegasan Pemesanan** dan tidak mengakui pihak lain yang mengaku sebagai yang turut berhak atas pemesanan **Unit** dalam **Penegasan Pemesanan** ini meskipun hal tersebut diakui oleh **PEMESAN**.
- 26.8. Semua lampiran pada **Penegasan Pemesanan** dan segala perubahannya merupakan bagian yang sah dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari **Penegasan Pemesanan**.
- 26.9. **Penegasan Pemesanan** dibuat dalam Bahasa Indonesia dan setiap penafsiran dari **Penegasan Pemesanan** hanya dapat didasarkan kepada teks **Penegasan Pemesanan** Bahasa Indonesia. Adapun jika dibuat dalam bahasa lain hanya berfungsi sebagai referensi saja.
- 26.10. **PEMESAN** menjamin akan kebenaran dan keabsahan identitas **PEMESAN** sesuai dengan surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang diberikan serta keterangan-keterangan yang disampaikan kepada **PENERIMA PESANAN**.
- 26.11. **PEMESAN** juga berjanji dan terikat untuk menyampaikan, menjelaskan dan menyerahkan semua dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang melekat pada **Unit** kepada siapapun yang menerima pengalihan hak, kapanpun dilakukan, sekalipun sudah AJB, sudah Sertipikat atas nama **Pembeli** dan sudah berdiri **P3SRS** sehingga Ketentuan-ketentuan dan Syarat-Syarat Umum ini beserta seluruh lampiran dari **Penegasan Pemesanan** tetap mengikat dan berlaku bagi **PEMESAN** dan pihak penerima pengalihan.
- 26.12. **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN** setuju dan sepakat untuk mengesampingkan seluruh ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan hukum yang berlaku sepanjang hal tersebut diperbolehkan demi tercapainya maksud dan tujuan **Penegasan Pemesanan**.
- 26.13. **PEMESAN** dan **PENERIMA PESANAN** setuju dan sepakat bahwa **Penegasan Pemesanan** sudah menjelaskan secara detail dan lengkap mengenai produk dan tata cara pembayaran. Apabila ada perbedaan antara dokumen-dokumen pemasaran termasuk brosur-brosur marketing yang dibuat sebelumnya oleh **PENERIMA PESANAN** dengan **Penegasan Pemesanan** (termasuk lampiran-lampirannya), Para Pihak dengan ini setuju bahwa yang akan berlaku dan mengikat terhadap Para Pihak adalah **Penegasan Pemesanan** ini (termasuk lampiran-lampirannya). Dengan demikian **PEMESAN** untuk saat ini dan dikemudian hari melepaskan **PENERIMA PESANAN** dari segala tuntutan dan/atau gugatan terkait dengan keberlakuan dokumen-dokumen pemasaran termasuk brosur-brosur marketing tersebut.

Pasal 27 PENUTUP

PEMESAN telah membaca, mengerti, mengetahui dan menyetujui seluruh isi dalam **Penegasan Pemesanan** berikut pasal-pasal dalam **Ketentuan dan Syarat** ini serta seluruh lampiran-lampirannya sebagai satu kesatuan.

----- 000 -----